



# **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**





# **MATERI INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**

## **DOMAIN LAYANAN SPBE INDIKATOR 32-47**



## INSTRUKTUR DOMAIN LAYANAN SPBE

Dr.Rer.Nat. **I Made Wiryana**,  
S.Kom., S.SI., MAPPSC  
**UNIVERSITAS GUNADARMA**



### ✓ Riwayat Pendidikan

- S3, Bidang Informatik, Bielefeld, Germany
- S2, Bidang Computer Studies, Edith Cowan University, Australia
- S1, Bidang Fisika, Universitas Indonesia, Jakarta
- S1, Bidang Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, Jakarta



### ✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Universitas Gunadarma



### ✓ Pengalaman SPBE

- 2018 – 2019, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi/Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB
- Koordinator Teknis, Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia
- Tim Pakar pada pengembangan pelatihan First Responder berbasis SNI 27037
- Tim ahli pengembangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Enterprise Architecture Design dan Cloud Computing



# Domain 4: Layanan SPBE



| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE  |
|----------------|---|
| <b>Aspek 7</b> | <b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>                          |
| 32             | Layanan Perencanaan   |
| 33             | Layanan Penganggaran  |
| 34             | Layanan Keuangan  |
| 35             | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa   |
| 36             | Layanan Kepegawaian   |
| 37             | Layanan Kearsipan Dinamis   |
| 38             | Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (SIMAKBMN)--- focus asset IT, SIMDABMJ |
| 39             | Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (WBS)  |
| 40             | Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Lakip, e-Sakip, LPPD, e-kinerja)            |
| 41             | Layanan Kinerja Pegawai (SIASN, SIMPEGNAS)  |



## INSTRUKTUR DOMAIN LAYANAN SPBE

Ir. **KHAKIM GHOZALI, M.MT.**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**



### ✓ Riwayat Pendidikan

- S2, Manajemen Teknologi Informasi , Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- S1, Teknik Elektro – Komputer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.



### ✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember



### ✓ Pengalaman SPBE

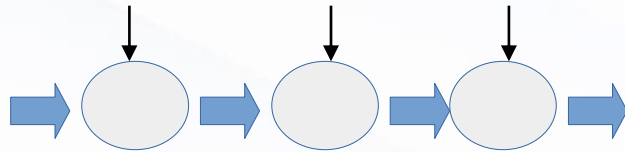
- 2020 : Evaluator Eksternal SPBE
- 1999 – 2018, Pengalaman Sebagai Evaluator TIK, antara lain: Review Implementasi Aplikasi Government Resources Management, Evaluasi Capaian Master Plan Smart City, Evaluasi Capaian Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan masih banyak lagi.
- 2001 – 2020, Pengalaman Penyusunan Rencana Induk SPBE/TIK di berbagai Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2012 – 2017, Pengalaman Sebagai Narasumber TIK di berbagai kesempatan
- 2000 – 2019, Pengalaman Dalam Pembuatan Aplikasi di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



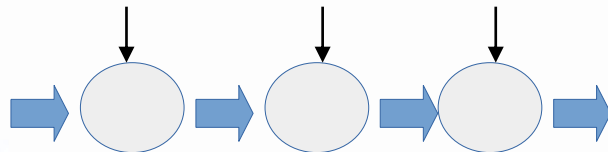
# Domain 4: Layanan SPBE

| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE            |
|----------------|---|
| <b>Aspek 8</b> | <b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>       |
| 42             | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik              |
| 43             | Layanan Data Terbuka                            |
| 44             | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) |
| 45             | Layanan Publik Sektor 1                         |
| 46             | Layanan Publik Sektor 2                         |
| 47             | Layanan Publik Sektor 3                         |

# Perubahan Kerja dengan TIK

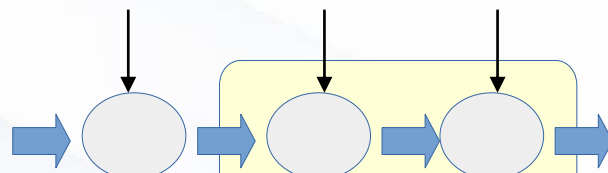


Layanan tanpa TIK



Sistem Elektronik

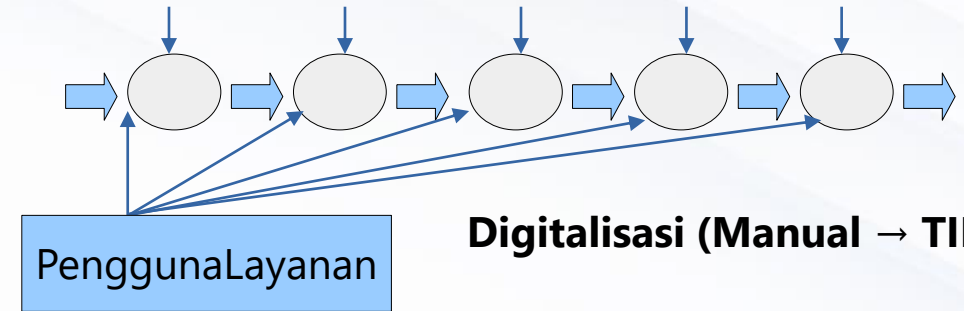
Layanan DIDUKUNG  
Sistem Elektronik



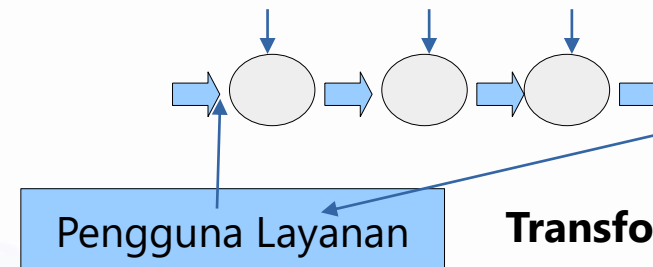
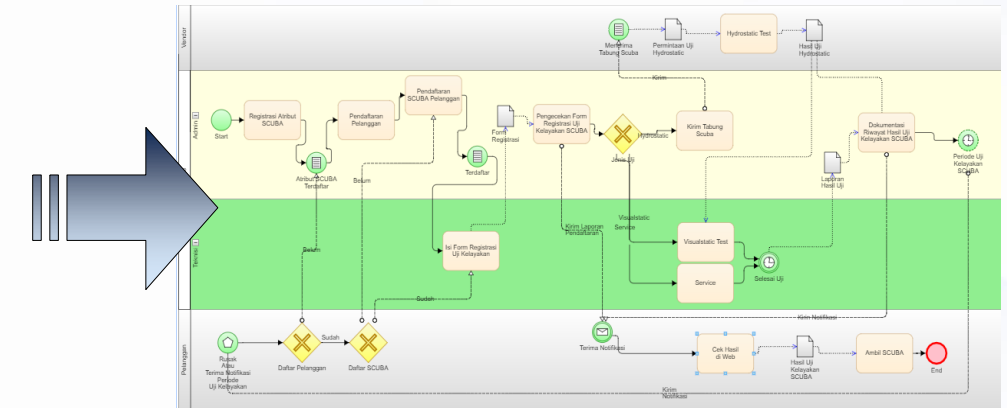
Sistem Elektronik

Layanan BERBASISKAN  
Sistem Elektronik

berubah karena  
adanya sistem  
elektronik (dilakukan  
*Business Process  
Reengineering*)



Digitalisasi (Manual → TIK)



Transformasi Digital

# Layanan



Program Aplikasi [Software]



Program Aplikasi + Komputer



Sistem Informasi



Layanan Sistem Informasi

*Layanan terintegrasi dan kolaboratif secara menyeluruh, adaptif secara berkesinambungan*

SDM Pengelola + Data/Infomasi

SDM Pengelola  
Manajemen+Tata  
Kelola  
Kebijakan  
Pengguna

# Kebijakan Internal → Layanan



# Tingkat kematangan dan evidence



Layanan

1

Memberikan informasi 1 arah

1 - Informasi



2

pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.

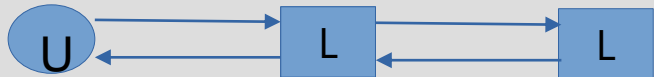
2 - Interaksi



3

layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

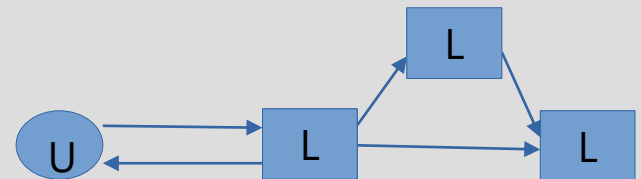
3 - Transaksi



4

Layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain

4 - Kolaborasi

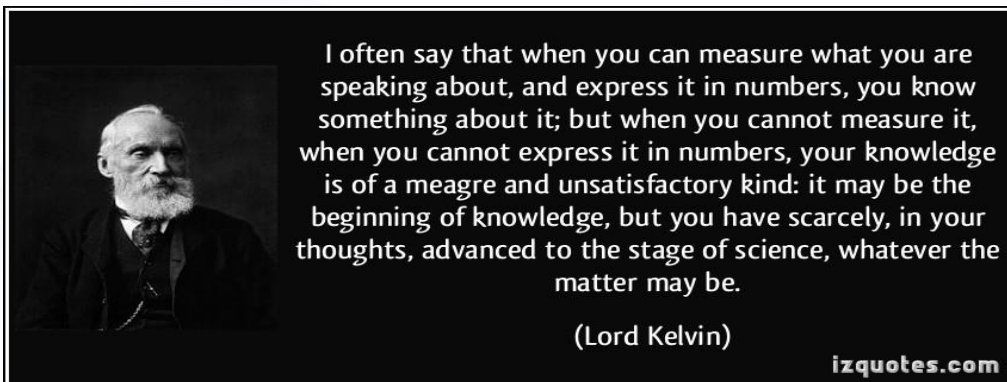
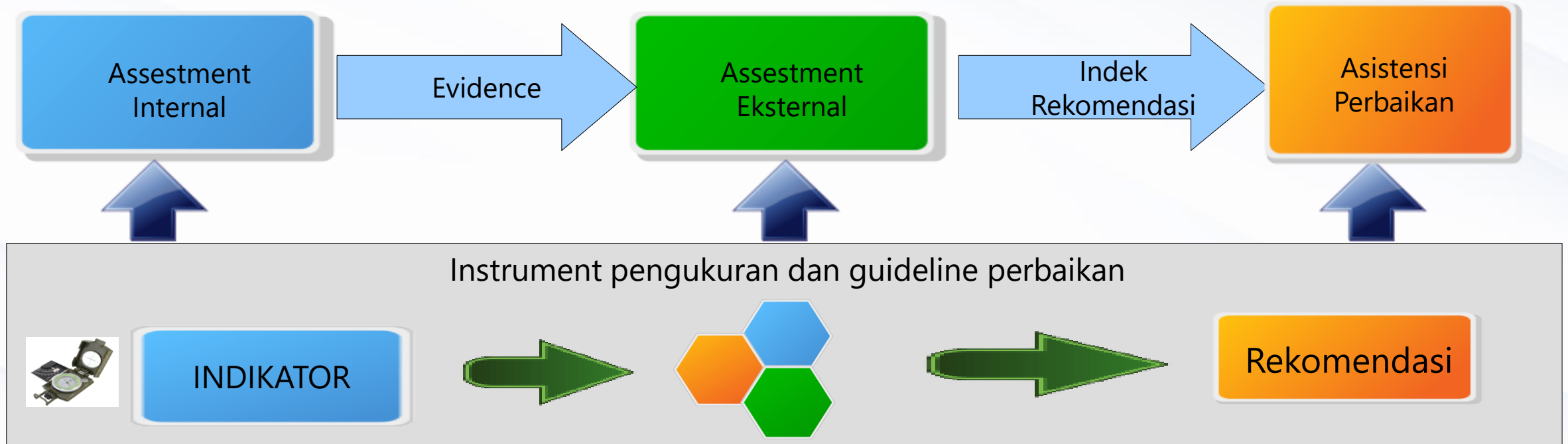


5

Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti

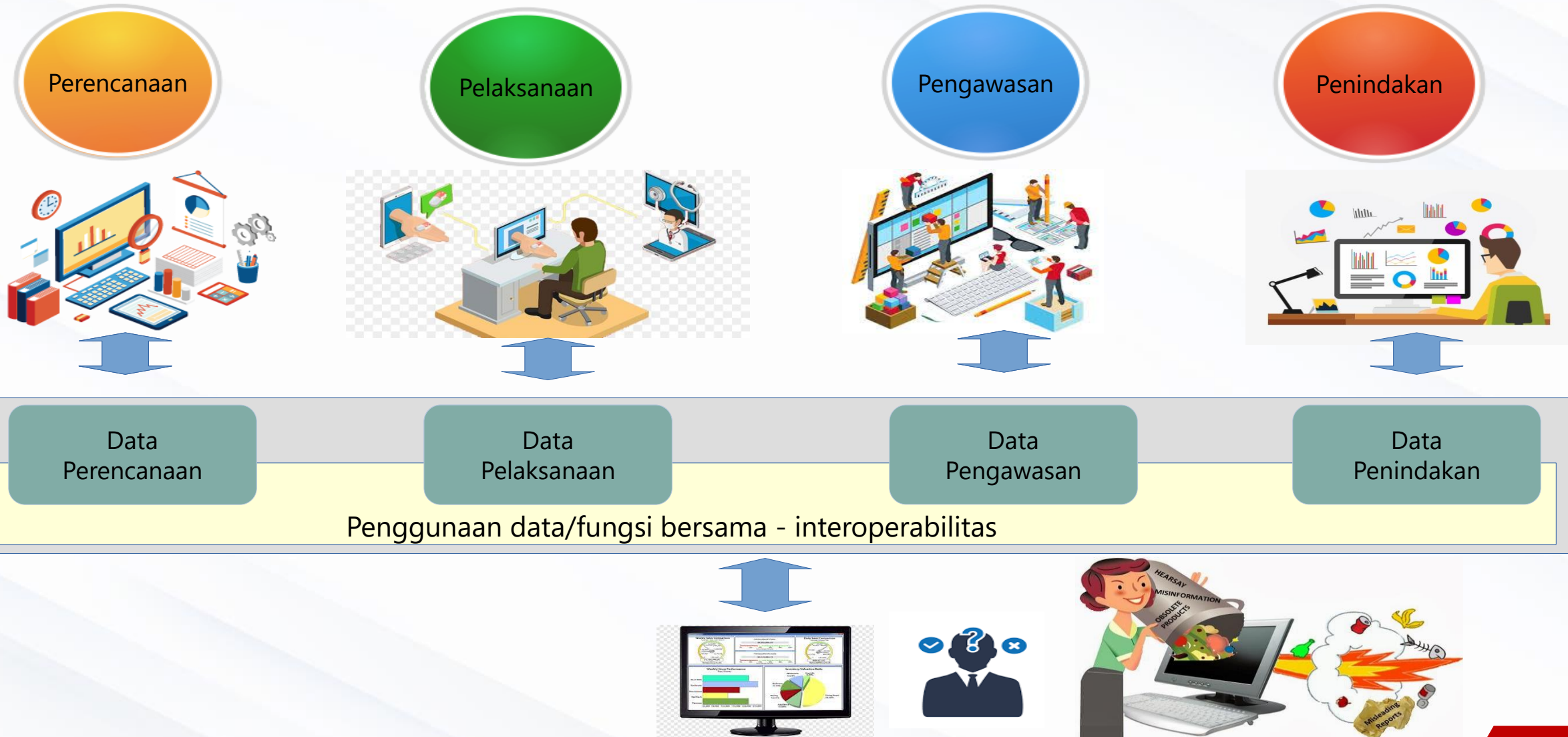
5 - Optimum

# Fungsi Indikator



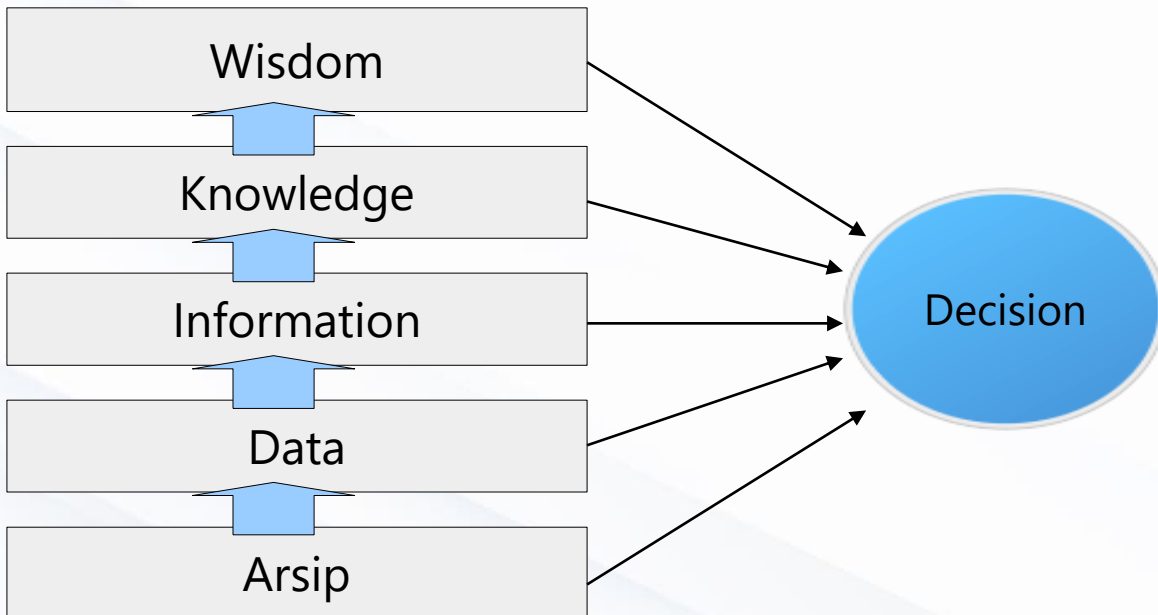
- Indeks bukan saja untuk assestment/ranking
- Bisa untuk perbaikan secara mudah oleh K/L/D
- Pendekatan evidence—guidance, dibanding ekspert atau kuesioner

# Sistem Elektronik dan Layanan Publik



# Integrasi Multistakeholder

- Interoperabilitas di sistem yang heterogen
- Beragam organisasi dapat bertukar data/informasi
- Beragam teknologi dapat bertukar data/informasi
- Dibutuhkan "central point" sebagai penyelar data/informasi

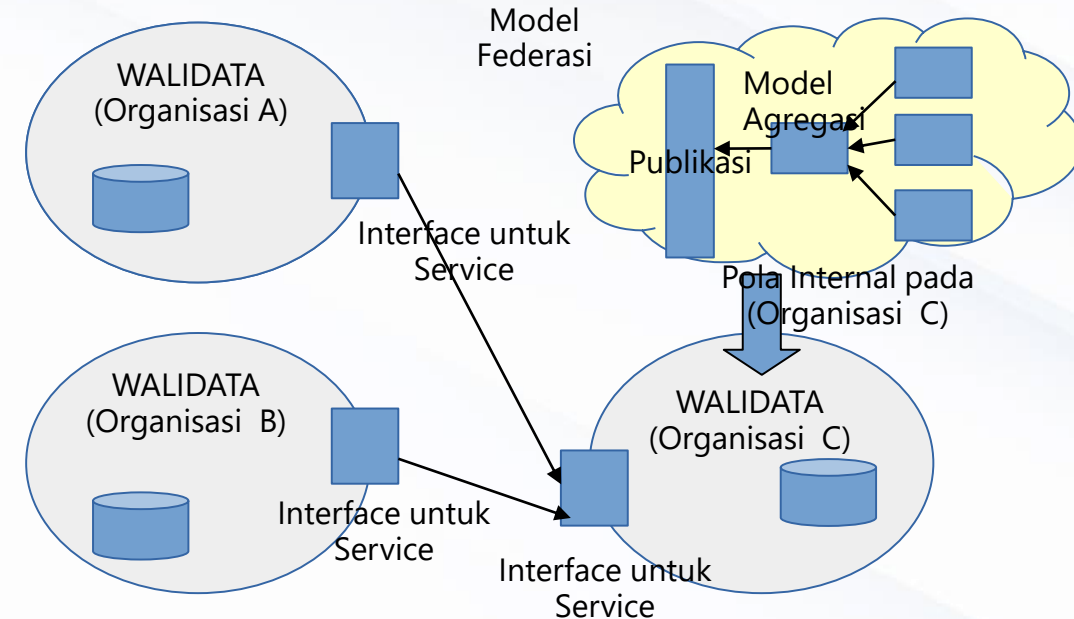
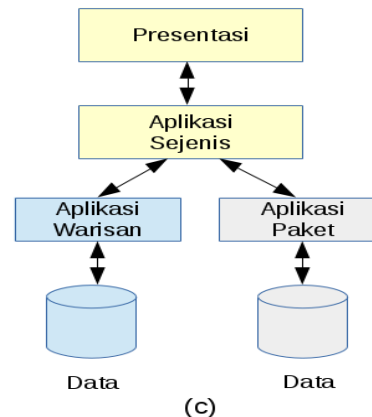
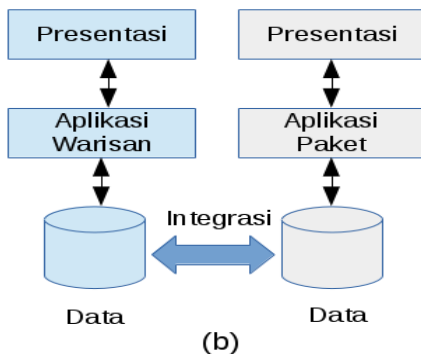
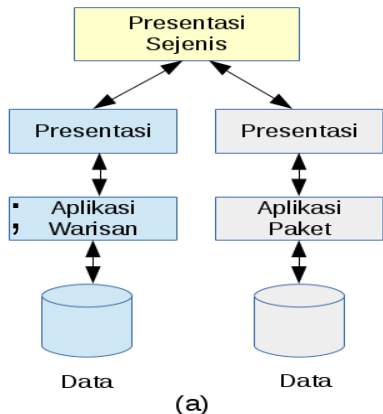


# Jenis integrasi

- **Integrasi Presentasi.** User interface yang menyediakan akses pada suatu aplikasi. kinerja, persepsi, dan tidak adanya interkoneksi antara aplikasi dan data.

- **Integrasi Data.** Dilakukan langsung pada basis data atau struktur data. Jika terjadi perubahan model data, maka integrasinya perlu direvisi atau dilakukan ulang.

- **Integrasi Fungsional** Proses integrasi dilakukan pada level logik a aplikasi.



- Sistem informasi di masing-masing organisasi tidak bisa bertukar data/informasi
- Interoperabilitas data akan mengefisienkan kerja serta dapat melakukan prediksi dan analisis untuk decision support system

# Tahap Integrasi kolaboratif



Semua pihak  
Sepakat tujuan



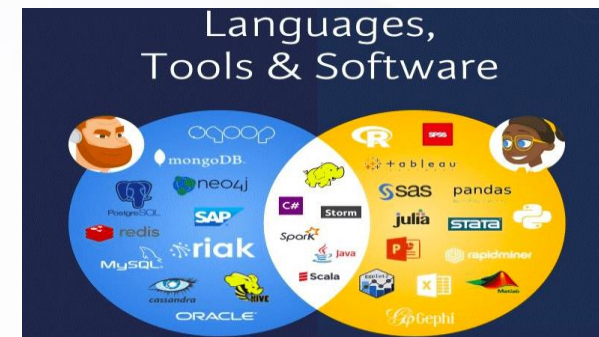
Sudah ada dalam  
Renstra Tahunan



Anggaran sudah  
disiapkan



Peraturan tidak  
bertabrakan



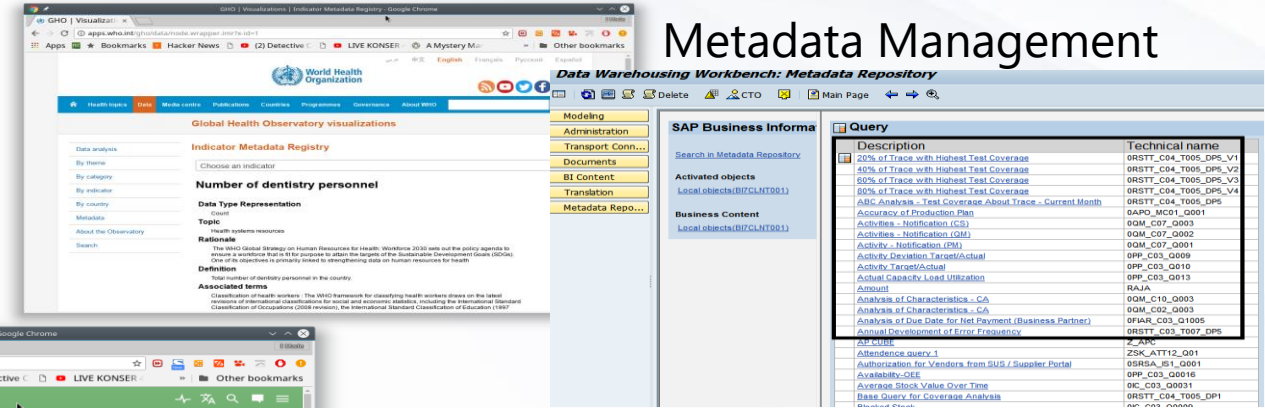


# Komponen Pendukung Integrasi

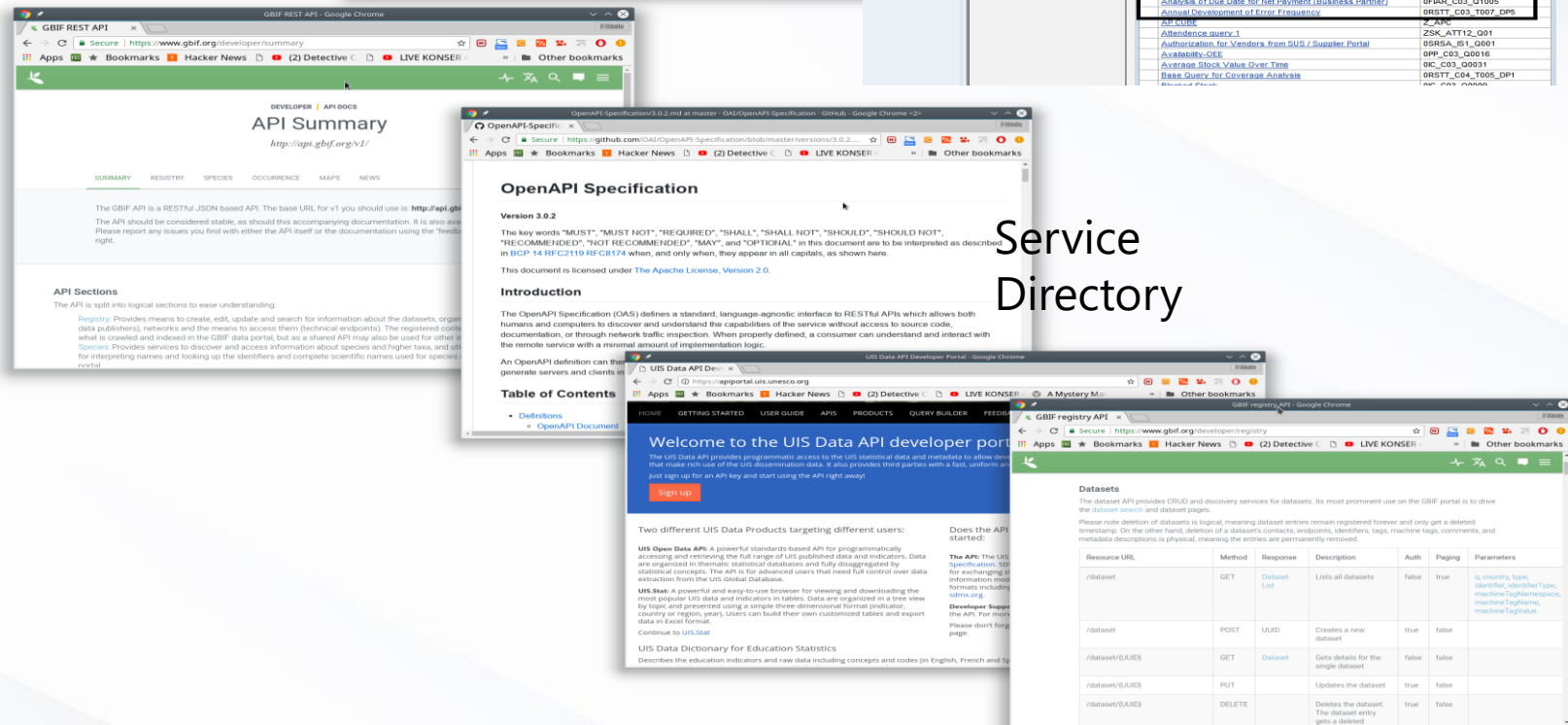


- Metadata Management
  - Mencatat data dan sumber data
  - Metadata terkait
- Service Directory
  - Mencatat layanan data yang diberikan
  - Lembaga lain dapat memanfaatkan data dan analisis yang ada
- Dukungan SDMX
  - Statistical Data and Metadata Exchange Protocol merupakan ISO standard untuk menjelaskan data statistik dan metadatanya
  - Memudahkan pertukaran data statistik antar lembaga sejenis

## Metadata Management



## Service Directory



## SDMX Protocol

# Teknologi Integrasi

## • Tahun 80-an

- Remote Procedure Call (RPC) dengan C/C++
- Electronic Data Interchange (EDI) dengan ASN.1
- Distributed Component Object Model (DCOM)

## • Tahun 90-an

- CORBA (Unix/Linux)
- Web dan Http

## • 1998

- XML kemudian XML-RPC
- Service Oriented Architecture (SOA)

## • 2000

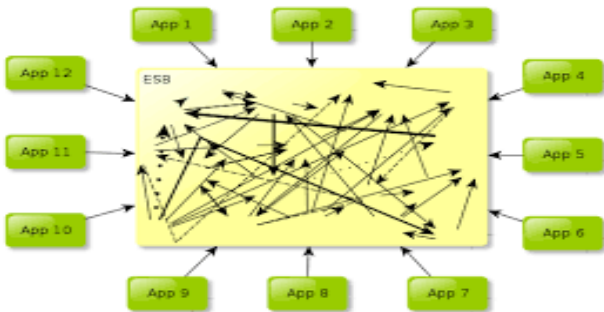
- Web Service : Universal Discovery and Integration (UDDI), Web Service Description Language, SOAP

## • 2010-an

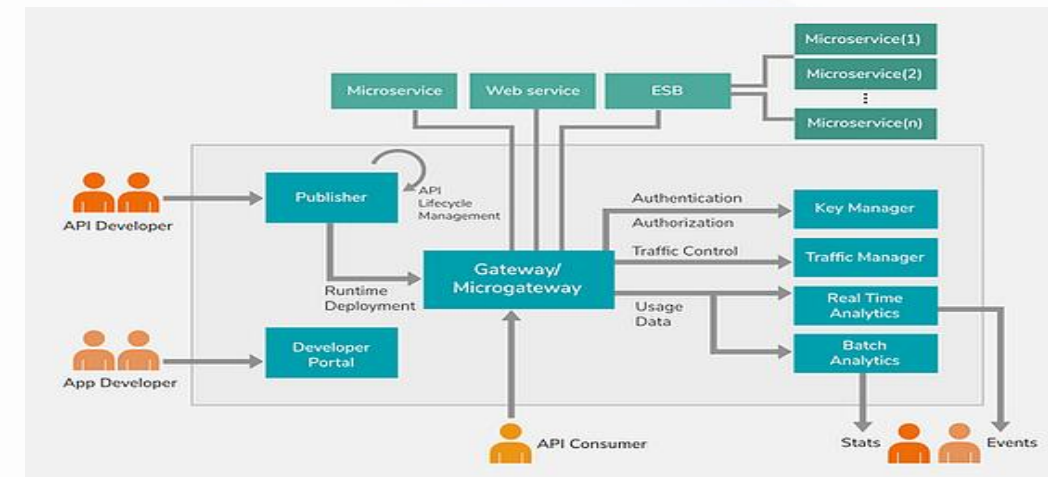
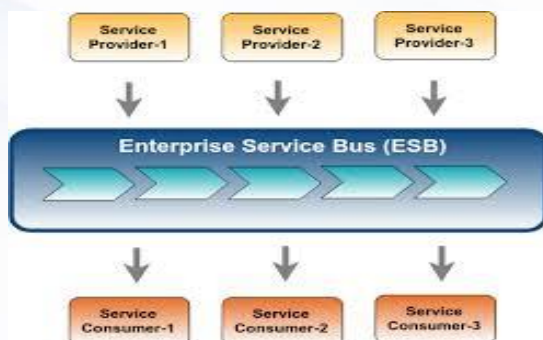
- REST (dipelopori Ray Fielding), persh besar kembali ke http dengan REST

## • 2015-an

- GraphQL
- gRPC



WSO2  
Krakend  
Umbrella API  
Kong  
Tyk.io  
Zato  
Mulesoft  
Istio  
RabbitMQ  
Kafka  
Object Storage





# Persiapan Assestment Layanan

- Mengenal aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan K/L/D dalam menyediakan Layanan Pemerintah
  - Misal SIKDA, SIPP, JDIH,
  - eBudgeting, dsb
  - Mengenal aplikasi berbagi pakai : SPSE, Srikandi, SAPK → SIASN,
- Mengenal “evidence” dari aplikasi tersebut (misal login screen, output)
  - Tidak cukup hanya login screen
  - User manual, atau video
  - Lebih baik kalau ada “dummy account”
- Mengenal proses integrasi yang dapat dilakukan oleh aplikasi-aplikasi tersebut
- Diskusi dan sharing dengan sesama assesor → Kompendium aplikasi

# Kelengkapan Evidence

- Assestment SPBE berbasiskan Evidence. Seringkali evidence belum cukup untuk menggambarkan layanan yang akan dinilai. Pencarian justifikasi dari evidence membutuhkan waktu yang lama, dan **sulit dilakukan oleh asesor** eksternal karena hanya diketahui oleh instansi (misal API, screen aplikasi) ataupun pada sisi internal sistem (harus login dengan user name yang valid)
- Permasalahan:
  - Tidak jelas bukti yang diberikan terkait pada indikator mana. Bukti dikumpulkan tanpa penanda dan penjelasan yang jelas.
  - Tidak lengkap menggambarkan jalannya Layanan] , sehingga asesor harus memperkirakan maksud evidence tersebut
  - Tidak lengkap untuk menggambarkan tingat layanan tersebut (misal kolaborasi, tapi tida bukti yang menunjukkan evidence tersebut
  - Asesor eksternal sulit mencoba langsung layanan tersebyut (tidak ada dummy account)
- Solusi:
  - Pencatatan secara terstruktur evidence, secara lengkap dengan anotasi (penandaan) dan penjelasan yang cukup lengkap, dengan index bukti yang unik
  - Dilengkapi dengan bentuk bukti lain misal, animasi, flow UI ataupun dummy account

Aesor  
Internal

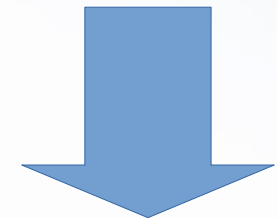
Indikator



Evidence



Penjelasan Evidence

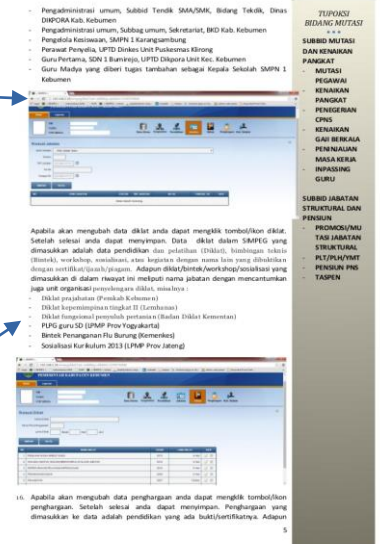


# Jenis Evidence

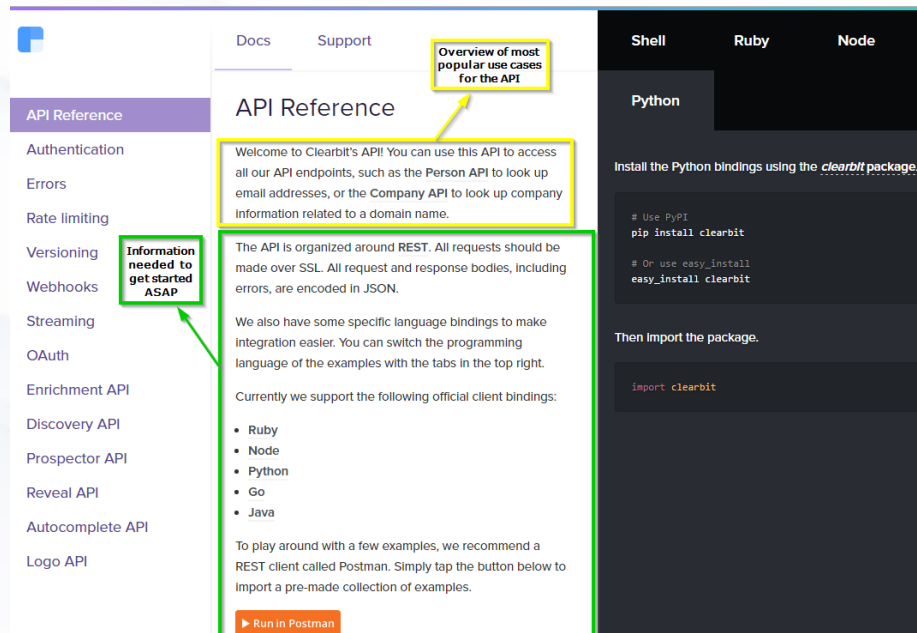
- Buku manual
- Screen shot (dalam bentuk flow program)
- Animasi singkat per fitur
- API
- Katalog Data
- Penjelasan kolaborasi

Penjelasan  
Menunjukkan  
Hal apa  
Pada level apa

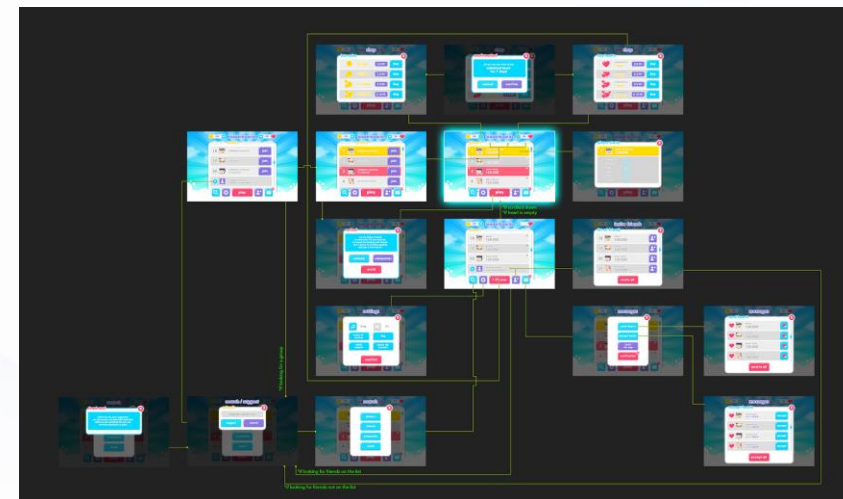
User manual  
dengan  
Catatan penjelasan  
Penjelasan  
Menunjukkan  
Hal apa  
Pada level apa



## Dokumentasi API



## Flow screen shoot



# Daftar Evidence

| No Indikator | Nama Layanan | Nama SIM | Unit Pengelola | Klaim indikator | Evidence | Keterangan |
|--------------|--------------|----------|----------------|-----------------|----------|------------|
|              |              |          |                |                 |          |            |
|              |              |          |                |                 |          |            |
|              |              |          |                |                 |          |            |
|              |              |          |                |                 |          |            |

Berikan **no yang unik** untuk semua evidence sehingga mudah ditemukan oleh asesor

Berikan nama layanan sesuai indikator SPBE. Sebab bisa satu aplikasi berkontribusi pada 2 indikator layanan

Berikan nama Sistem Informasi (SIM) yang digunakan sebagai evidence.

Unit pengelola layanan atau SIM tersebut.

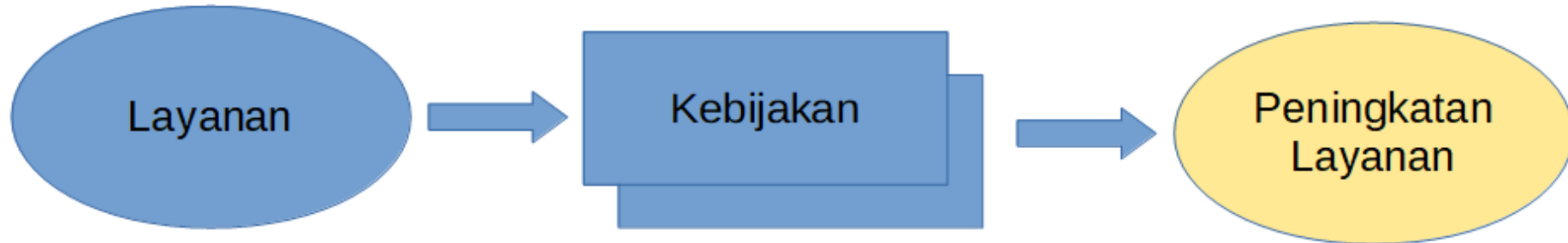
Indikator yang diklaim dengan evidence itu. Nilai dari 1-5. Jadi misal evidence ini menunjukkan pertukaran data dapat ditulis 4 (kolaborasi)

Evidence yang diberikan misal screenshot, nomor X, animasi nomor Y, atau user manual dsb

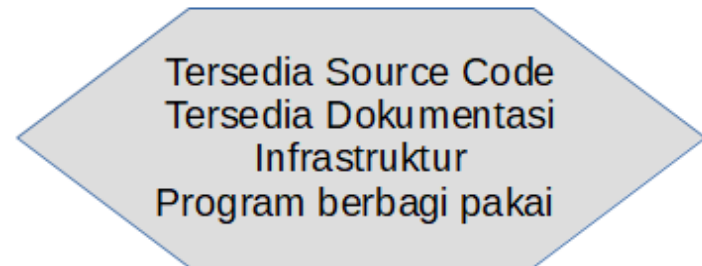
Keterangan tambahan yang diberikan untuk menjelaskan layanan tersebut terkait indikator

# Peningkatan Index SPBE

## Strategi 1



Pilih Aplikasi Berbagi Pakai



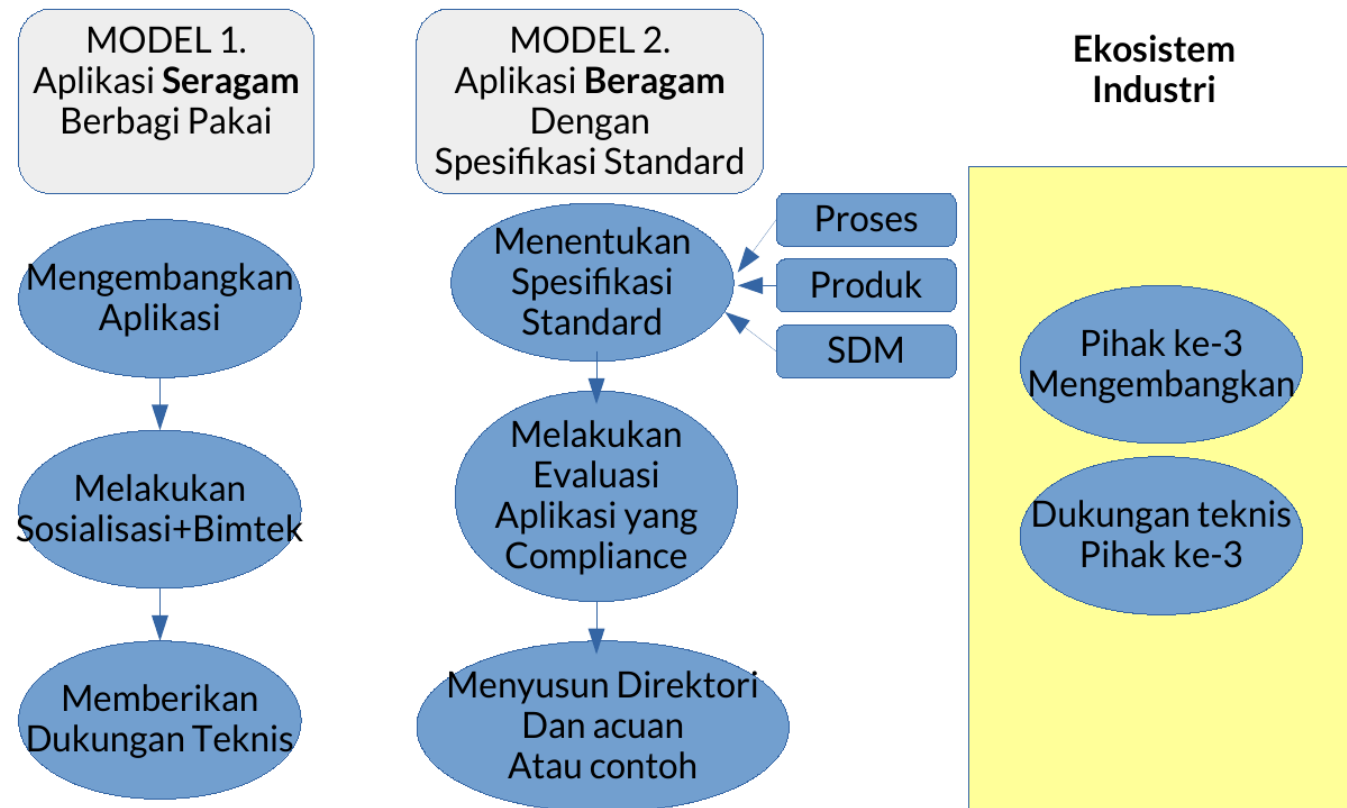
## Strategi 2



Pilih Aplikasi Berbagi Pakai

# Aplikasi berbagi pakai

- Opsi 1. Lembaga pemerintah sebagai *software house*
  - Developer team
  - Support team
  - Training team
  - Permasalahan “core business” dan kapasitas organisasi (SDM, organisasi, jam kerja)
- Opsi 2. Lembaga pemerintah sebagai pengatur dan central point (clearance house)
  - Perlu pendefinisian standard-standard
  - Perlu menentukan tata kelola serta mekanisme money kepada pelaksana
  - Menyusun mekanisme koordinasi dan instrumen bantunya



FOKUS PADA PEMENUHAN PROSES BISNIS

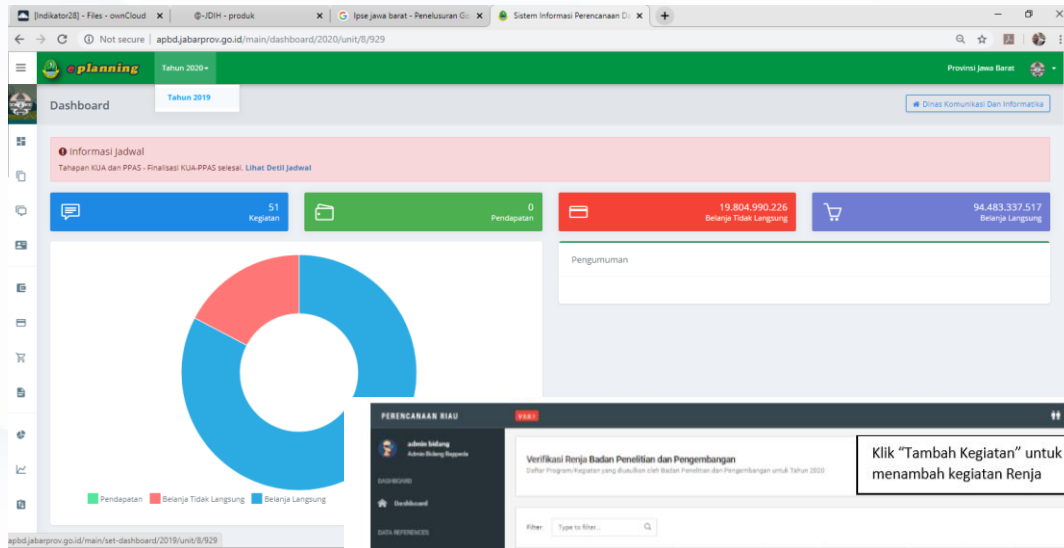


# Indikator 32

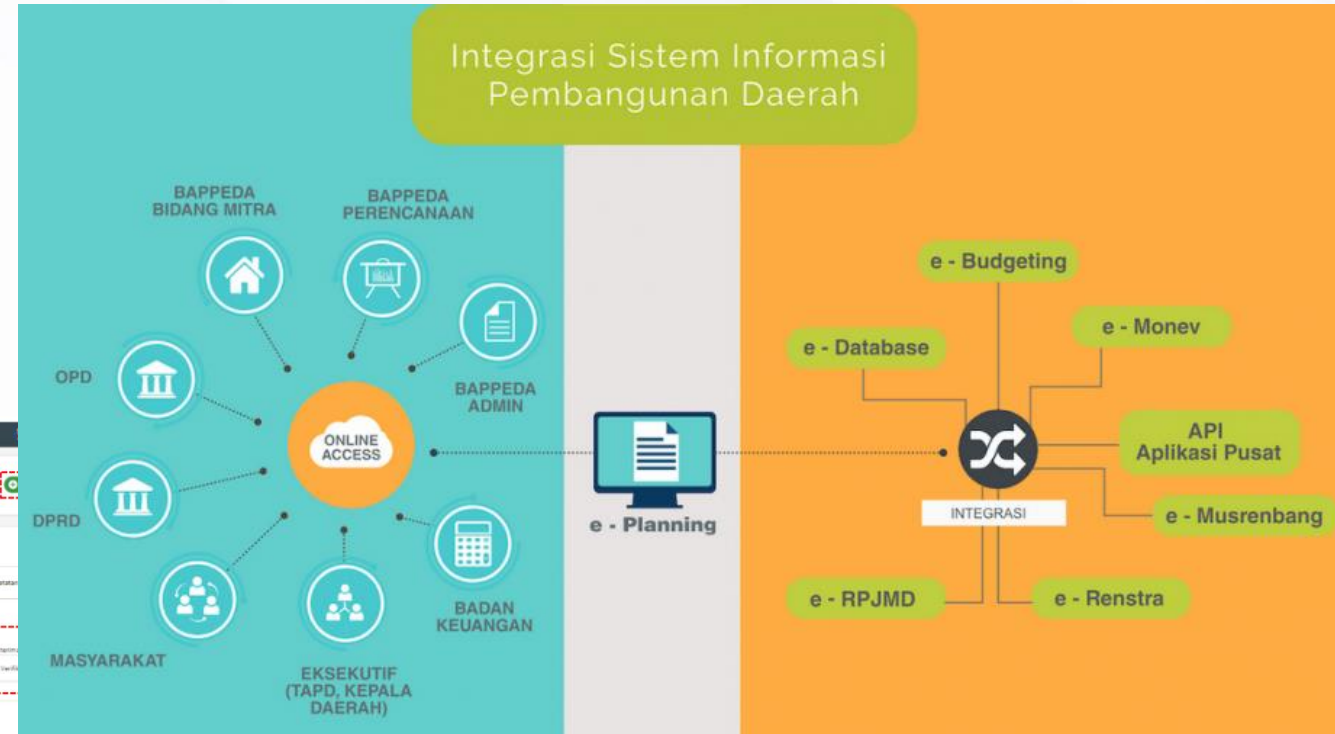
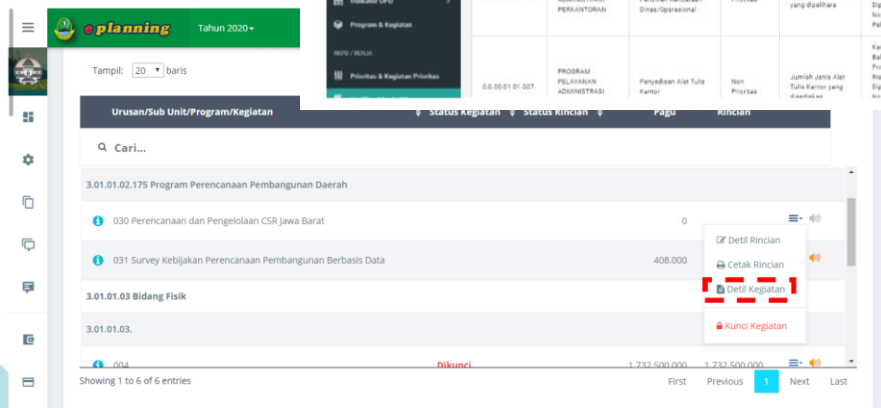


| Domain 4     | Layanan SPBE   | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|--|---------|---|
| Indikator 32 | Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria   |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.  |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.  |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.   |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5   |         |   |
| Penjelasan : |  |         |   |

# Indikator 32



Klik tombol DETAIL KEGIATAN u rekomendasi



“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



# Indikator 33



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|---|
| Indikator 33 | Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait penganggaran kegiatan pemerintah.   |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen penganggaran, dan pengunduhan dokumen penganggaran.   |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.   |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan perencanaan berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan penganggaran berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |   |
| Penjelasan : |   |         |   |



# Penganggaran-eBudgeting



Table Rencana Anggaran Biaya

Data RAB berhasil dimasukkan ke dalam database

Tahun: 2016

Direktorat: Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

Show 10 entries

| Kode RKAKL  | Uraian Acara | Tanggal     | Lokasi  | Status         | Action  |
|---|--------------|-------------|---------|----------------|---|
| Program : 06<br>Output : 001<br>Sub Output : 001<br>Komponen : 053<br>Sub Komponen: A | Acara 2      | 10 Feb 2016 | Jakarta | Belum Diajukan | <a href="#">Ajukan</a><br><a href="#">Edit</a><br><a href="#">Add Transaksi</a> |
| Program : 06<br>Output : 001<br>Sub Output : 001<br>Komponen : 053<br>Sub Komponen: A | acara 1      | 1 Feb 2016  | Jakarta | Close          | <a href="#">View Transaksi</a><br><a href="#">Cetak Rincian</a>                 |

Previous 1 Next

E-BUDGETING

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Tampil Unit

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Show 10 entries

| No | OPD                                     | KUA / PPA     | RKA         | Selisih      |
|----|---|---------------|-------------|--------------|
| 40 | KECAMATAN BATANG                        | 70.000.000    | 16.500.000  | -53.500.000  |
| 18 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 1.200.000.000 | 895.700.000 | -304.300.000 |

RKA Organisasi Perangkat Daerah



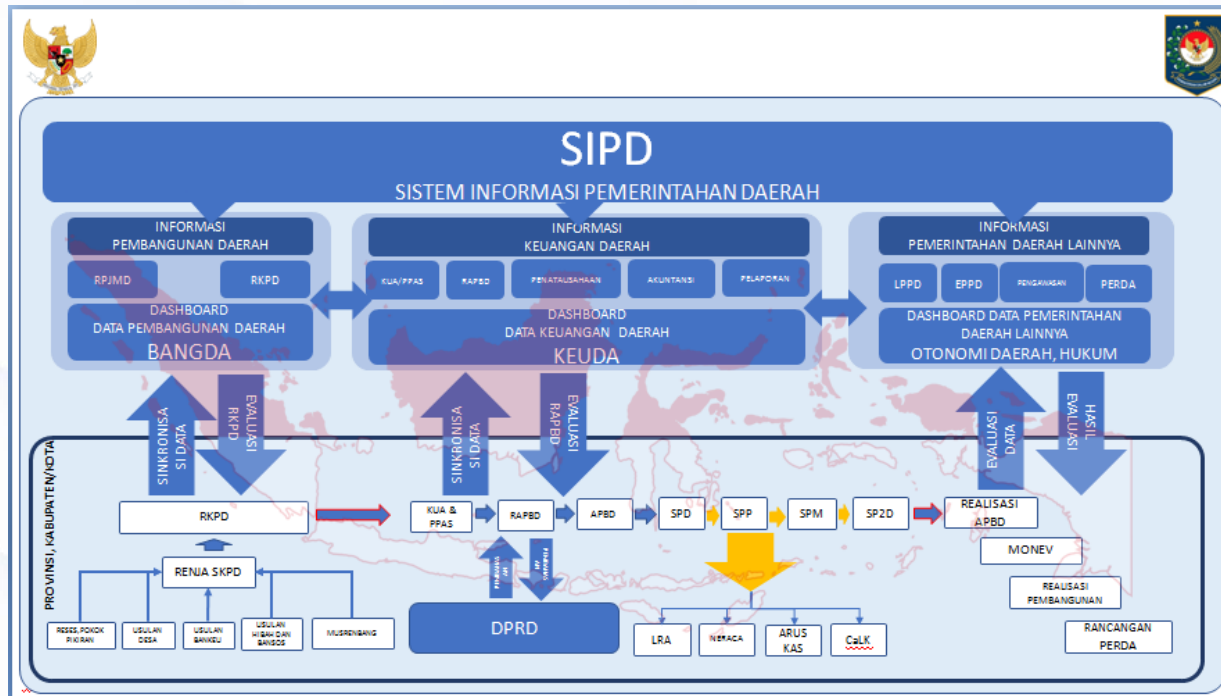
# Indikator 34



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|---|
| Indikator 34 | Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah.  |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |   |
| Penjelasan : |   |         |   |
| Data dukung: |   |         |   |



# Sistem Keuangan





# Indikator 35



| Domain 4     | Layanan SPBE   | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|--|---------|---|
| Indikator 35 | Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria   |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.   |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.   |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.   |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5   |         |   |
| Penjelasan : |  |         |   |
| Data dukung: |  |         |   |

# Layanan Pengadaan



MEMUNCULKAN PERAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
sebagai pelaksana  
Swakelola

**POIN  
PERUBAHAN**

PELAKSANAAN PENELITIAN  
DIATUR KHUSUS





# Indikator 35



The screenshot shows the LPSE Provinsi Bali website. The top navigation bar includes links for BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, and KONTAK KAMI. Below this, there are banners for LKPP (Logistik dan Manajemen Pengadaan) and a green banner for "AYO IKUT TENDER!". The main content area features a list of tender packages with columns for No, Nama Paket, HPS, and Akhir Pendaftaran. The list includes packages for Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi Badan Usaha, and Pekerjaan Konstruksi.

The screenshot shows the LPSE Provinsi Bali website with the search results for tenders. The top navigation bar includes links for BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, and KONTAK KAMI. Below this, there are tabs for Tender and Non Tender. The search results table lists various tender packages with columns for Kode, Nama Paket, Instansi, Tahap, and HPS. The table includes packages for Belanja Obat, BMHP dan Reagen, DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Tejakula dan SMAN SATAP Nusa Penida, DED Tahap I Pembangunan SMKN 2 Kuta Selatan, and Belanja BHP Gizi.

"data dukung"

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



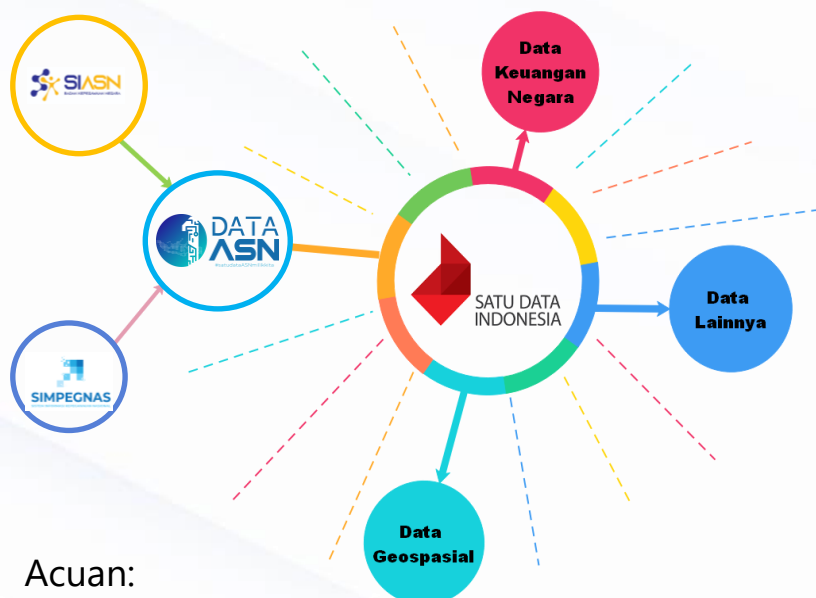
# Indikator 36



| Domain 4     | Layanan SPBE   | Aspek 7 | Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE |
|--------------|--|---------|-------------------------------------|
| Indikator 36 | Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik   |         |                                     |
| Tingkat      | Kriteria   | Capaian |                                     |
| 1            | Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.  |         |                                     |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.   |         |                                     |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.   |         |                                     |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |                                     |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |                                     |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5   |         |                                     |
| Penjelasan : |  |         |                                     |
| Data dukung: |  |         |                                     |



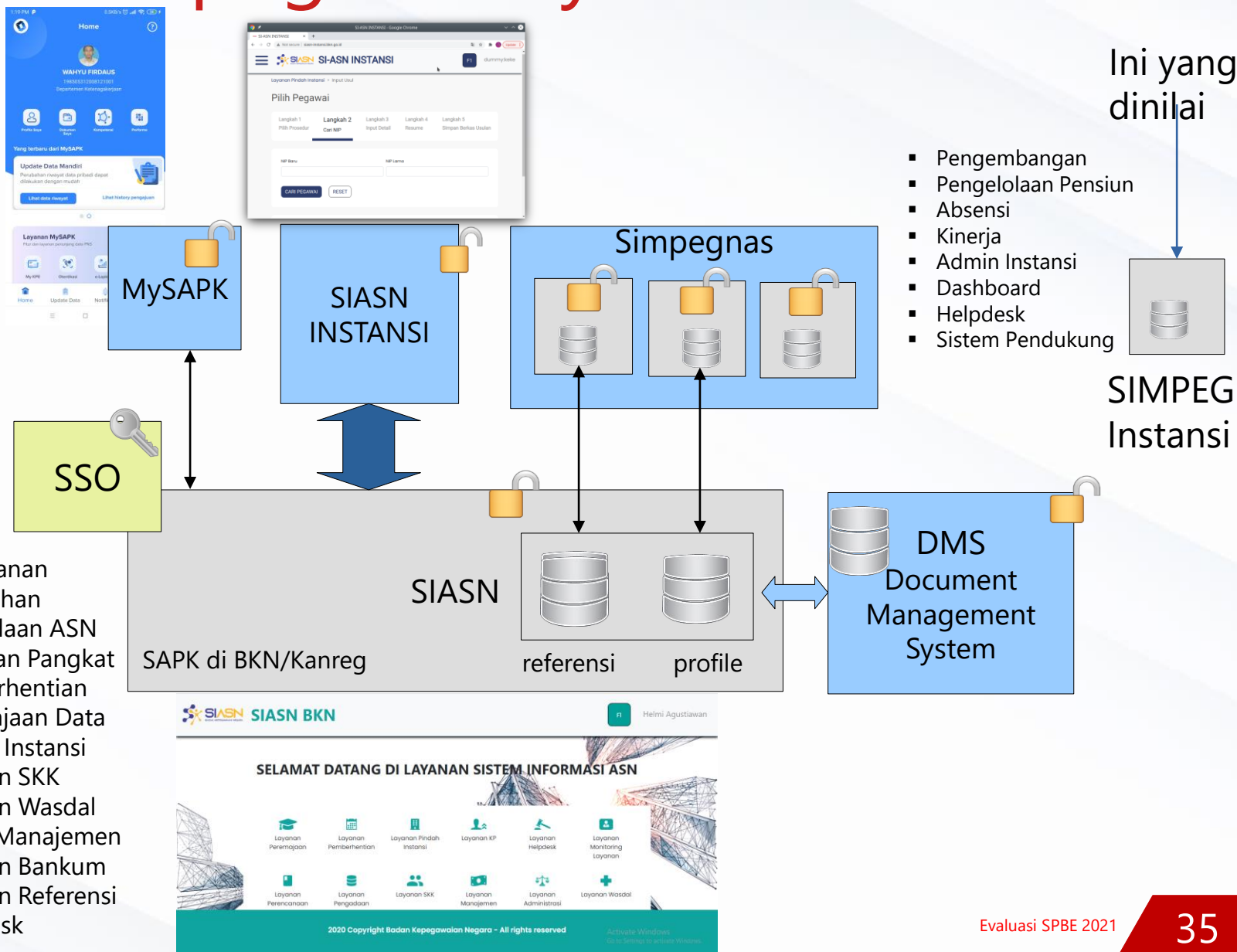
# SIASN-Simpegnas-MySAPK



Acuan:  
Proses Bisnis Layanan Kepegawaian (BKN)

- **Layanan Elektronik** Kepegawaian
- **Data** Kepegawaian
  - Data Referensi
  - Data Pegawai
- **Dokumen** kepegawaian (Pertek, SK, Formulir)
- **Arsip** Kepegawaian (Retensi Kepegawaian berbeda dengan Retensi standar)
- Layanan **Identitas** (SSO)

- Perencanaan Kebutuhan
- Pengadaan ASN
- Kenaikan Pangkat
- Pemberhentian
- Peremajaan Data
- Pindah Instansi
- Layanan SKK
- Layanan Wasdal
- Talent Manajemen
- Layanan Bankum
- Layanan Referensi
- Helpdesk



# Indikator 36

The screenshot displays two parts of the SPBE application. The top part shows the login page for the Government of West Lombok, with fields for username and password, and a 'Login' button. The bottom part shows the user profile page for Joshua Ariel Perkasa, displaying personal and professional details.

**data dukung**

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



# Indikator 37



| Domain 4     | Layanan SPBE   | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|--|---------|---|
| Indikator 37 | Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria   |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kearsipan.  |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kearsipan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.   |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kearsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.   |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5   |         |   |
| Penjelasan : |  |         |   |
| Data dukung: |  |         |   |



# Indikator 37



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ARSIP NASIONAL

Pengguna: 6, Instansi: 10, Dokumen: 6, Pesan: 0

| No | Kode     | Nama Instansi   | Tanggal Buat    |
|----|----------|---|-----------------|
| 1  | 14000000 | KOTA BANDUNG  | 04 Oktober 2020 |
| 2  | 13000000 | KEMENTERIAN DEMO  | 04 Oktober 2020 |
| 3  | 12000000 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA       | 04 Oktober 2020 |
| 4  | 11000000 | LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA                  |                 |
| 5  | 10000000 | BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA      |                 |
| 6  | 90000000 | SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA |                 |
| 7  | 80000000 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA                     |                 |

Showing 327 results

Only digital objects

Sort by: Most recent

| ARCHIVAL INSTITUTION                   | CREATOR                                |
|--|--|
| City of Greater Sudbury Archives       | Wilfrid Laurier University             |
| Guelph Public Library Archives         | Rodney Branch 525, Royal Canadian L... |
| The Law Society of Upper Canada Arc... | Waterloo College Invitation Games      |
| Wilfrid Laurier University Archives    | Heldmann, Jim                          |
| City of Vaughan Archives               | Stapleton, James                       |
| Deseronto Archives                     | Russell, Harold                        |
| Elgin County Archives                  | Waterloo College                       |
| City of Thunder Bay Archives           | Waterloo Lutheran Seminary             |
| University of Western Ontario Archives | Roy, Flora                             |
| Whitby Archives                        | Gomann, Emil A.                        |

"data dukung"

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi

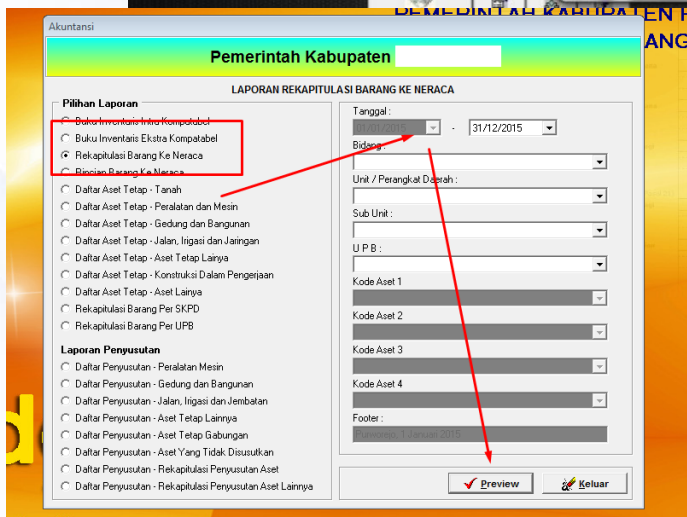
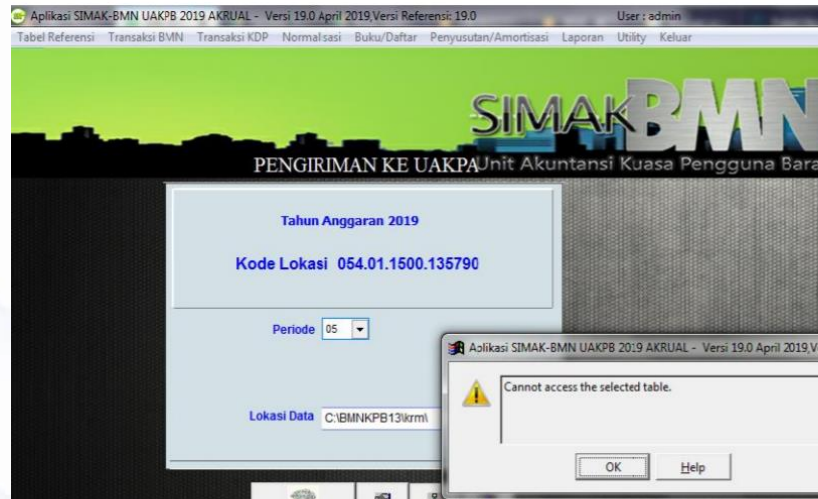


# Indikator 38



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|---|
| Indikator 38 | Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik  |         |   |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara.   |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |   |
| Penjelasan : |   |         |   |

# Indikator 38



“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



# Sistem Barang Milik Negara

- Instansi Pusat → SIMAK BMN
- Instansi Daerah → Asset daerah (accrual based), SIMDA Barang, SIMBADA, dsb
- Apakah terintegrasi dengan penganggaran, pengadaan, dsb.
- Contoh kesehatan (alat kesehatan di Puskesmas, RSUD), pendidikan (perpustakaan), dsb
- Fokus pada Asset TIK (aset berwujud dan aset tak berwujud)

Penganggara  
n

Pengadaan

Barang

Persediaan

Perencanaan

Pelaporan  
Keuangan

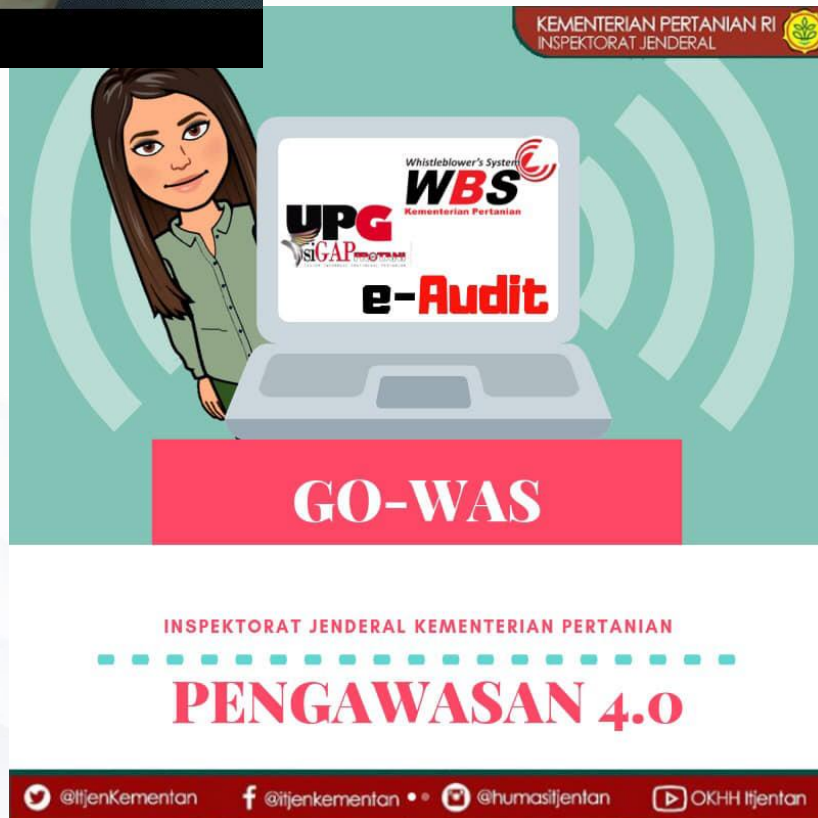


# Indikator 39



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|---|
| Indikator 39 | Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.   |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |   |
| Penjelasan : |   |         |   |

# Indikator 39



Ciri-ciri:

- Menjaga kerahasiaan, integrity, non repudation (nir sangkal)
- Apakah hard disk terenkripsi?
- Apakah admin bisa membaca nama dan informasi pelapor (enkripsi)
- Ditujukan ke Inspektorat

"data dukung"

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



# Indikator 40



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|---|
| Indikator 40 | Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik   |         |   |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |   |
| Penjelasan : |   |         |   |

# Indikator 40

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi





# Indikator 41



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 7 | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|---|
| Indikator 41 | Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik  |         |   |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian   |
| 1            | Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.   |         |   |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |   |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |   |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |   |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   |         |   |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |   |
| Penjelasan : |   |         |   |
| Data dukung: |   |         |   |



# Indeks Prestasi Pegawai (IPP)

$$IPP = w1.A1 + w2.A2 + w3.A3$$

IPP → Tunjangan

$$IPP = 0 \rightarrow 100$$

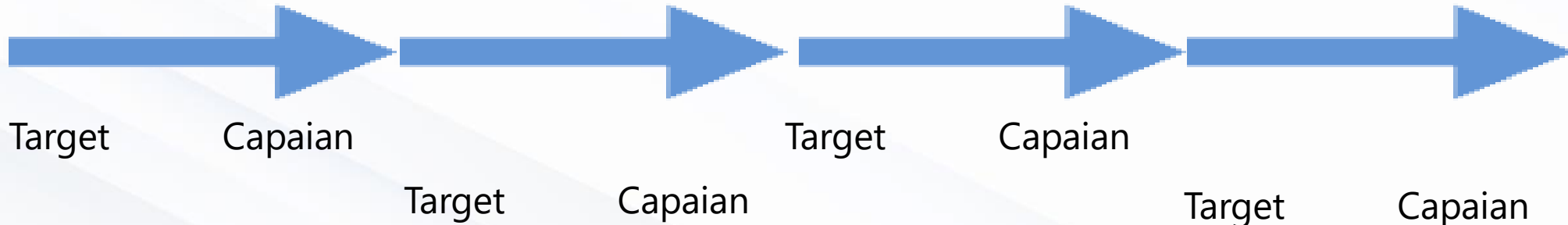
$$w1 + w2 + w3 = 100$$

A1: Disiplin (bulanan) ==> Ketaatan jam kerja, dan hukuman

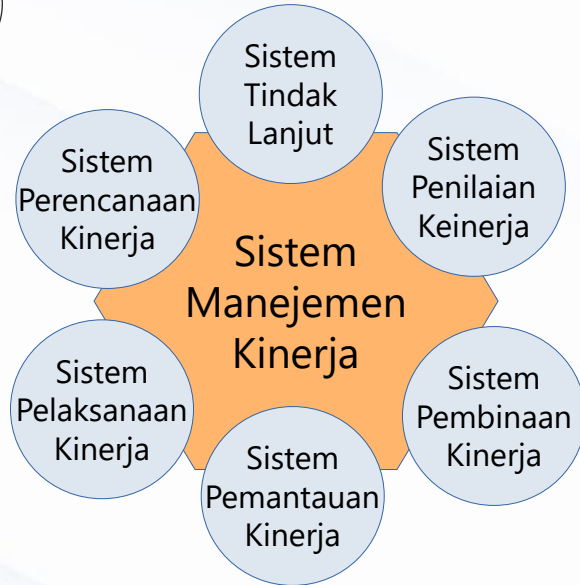
A2: Capaian Individu (3 bulan)

A3: Capaian Organisasi (6 bulan) ← dapat dari MKOK

Kinerja  
Instansi



# Indikator 41

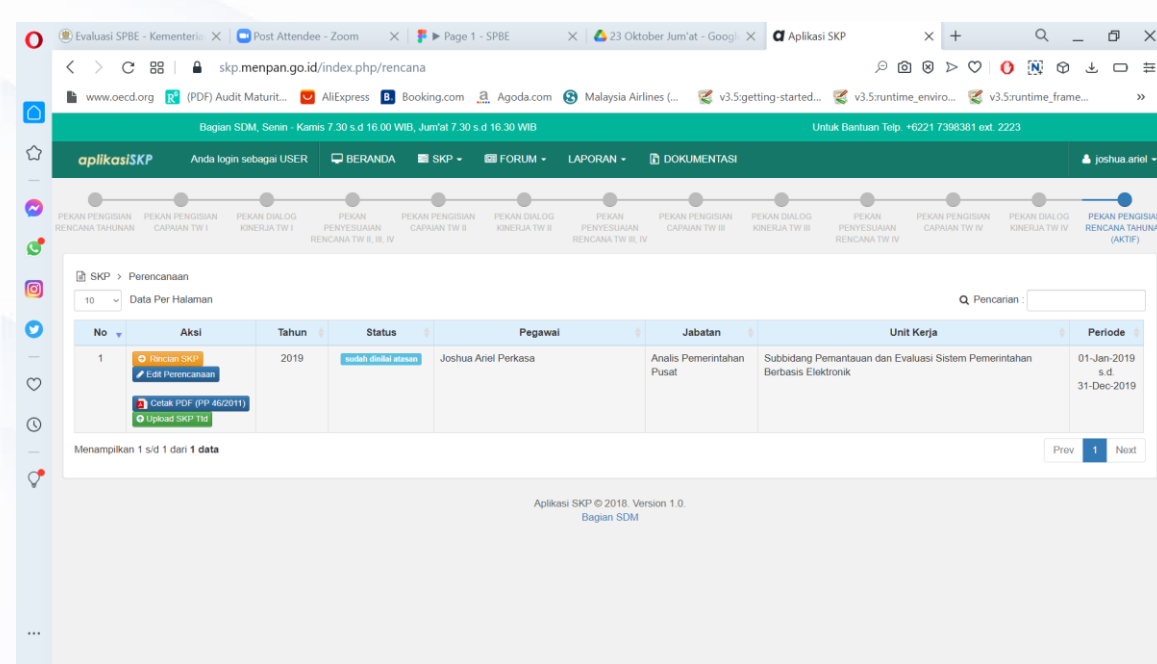


*Akan terkait erat dengan module Layanan Kepegawaian pada instansi*



"data dukung"

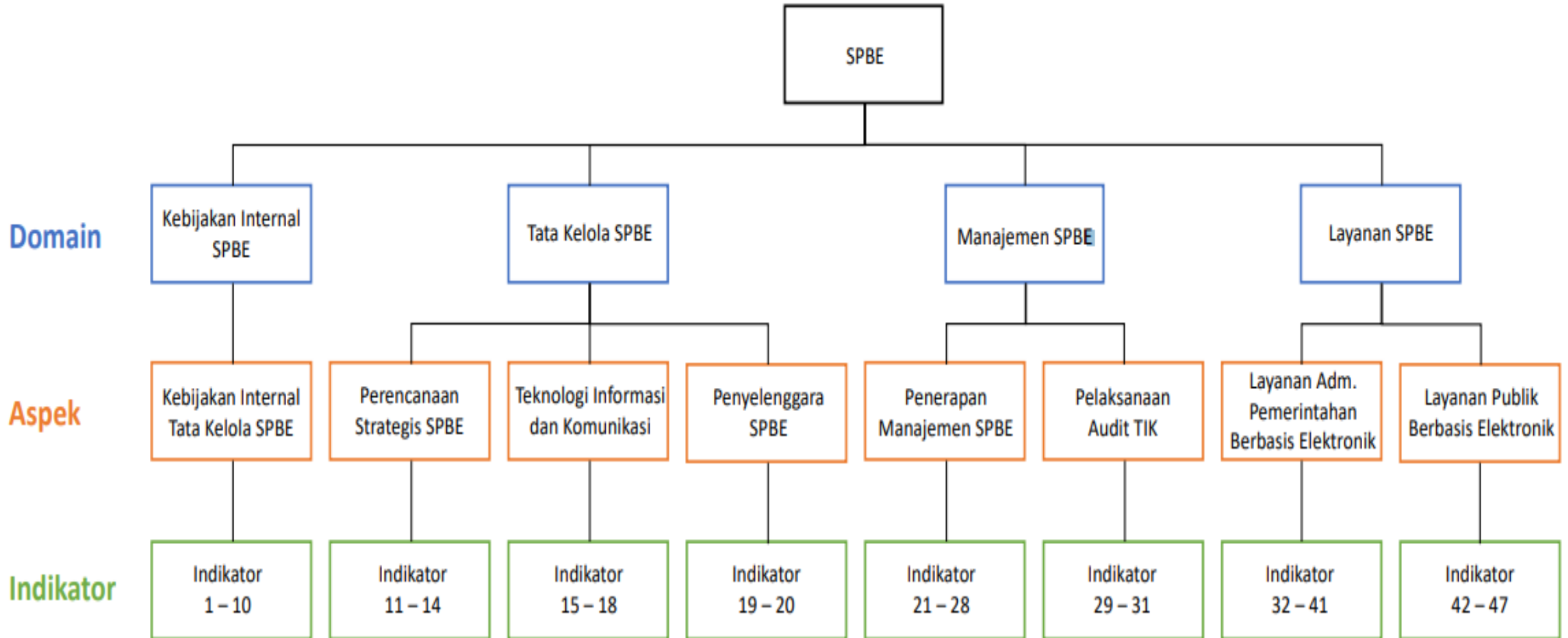
- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi





# Ringkasan Penerapan Instrumen Baru SPBE 2021

# Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE





# Domain 1: Kebijakan SPBE

## Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

| Indikator | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE                           |
|-----------|--|
| 1         | Kebijakan internal Internal Arsitektur SPBE                    |
| 2         | Kebijakan internal Peta Rencana SPBE                           |
| 3         | Kebijakan internal Manajemen Data                              |
| 4         | Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE                   |
| 5         | Kebijakan internal Layanan Pusat Data                          |
| 6         | Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemda |
| 7         | Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan        |
| 8         | Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi                |
| 9         | Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi    |
| 10        | Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE                         |



# Domain 2: Tata Kelola SPBE



| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE      |
|----------------|---|
| <b>Aspek 2</b> | <b>Perencanaan Strategis SPBE</b>         |
| 11             | Arsitektur SPBE                           |
| 12             | Peta Rencana SPBE                         |
| 13             | Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE     |
| 14             | Inovasi Proses Bisnis SPBE                |
| <b>Aspek 3</b> | <b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b> |
| 15             | Pembangunan Aplikasi SPBE                 |
| 16             | Layanan Pusat Data                        |
| 17             | Jaringan Intra Instansi                   |
| 18             | Penggunaan Sistem Penghubung Layanan      |
| <b>Aspek 4</b> | <b>Penyelenggara SPBE</b>                 |
| 19             | Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE           |
| 20             | Kolaborasi Penerapan SPBE                 |



# Domain 3: Manajemen SPBE

| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE     |
|----------------|--|
| <b>Aspek 5</b> | <b>Penerapan Manajemen SPBE</b>          |
| 21             | Penerapan Manajemen Risiko SPBE          |
| 22             | Penerapan Manajemen Keamanan Informasi   |
| 23             | Penerapan Manajemen Data                 |
| 24             | Penerapan Manajemen Aset TIK             |
| 25             | Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia |
| 26             | Penerapan Manajemen Pengetahuan          |
| 27             | Penerapan Manajemen Perubahan            |
| 28             | Penerapan Manajemen Layanan SPBE         |
| <b>Aspek 6</b> | <b>Pelaksanaan Audit TIK</b>             |
| 29             | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE     |
| 30             | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE          |
| 31             | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE          |



# Domain 4: Layanan SPBE



| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE  |
|----------------|---|
| <b>Aspek 7</b> | <b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>                          |
| 32             | Layanan Perencanaan   |
| 33             | Layanan Penganggaran  |
| 34             | Layanan Keuangan  |
| 35             | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa   |
| 36             | Layanan Kepegawaian   |
| 37             | Layanan Kearsipan Dinamis   |
| 38             | Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (SIMAKBMN)--- focus asset IT, SIMDABMJ |
| 39             | Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (WBS)  |
| 40             | Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Lakip, e-Sakip, LPPD, e-kinerja)            |
| 41             | Layanan Kinerja Pegawai (SIASN, SIMPEGNAS)  |



## Domain 4: Layanan SPBE

| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE            |
|----------------|---|
| <b>Aspek 8</b> | <b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>       |
| 42             | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik              |
| 43             | <b>Layanan Data Terbuka</b>                     |
| 44             | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) |
| 45             | Layanan Publik Sektor 1                         |
| 46             | Layanan Publik Sektor 2                         |
| 47             | Layanan Publik Sektor 3                         |

# Bobot Domain

| Nomor Domain | Nama Domain             | Bobot (%) |
|--------------|-------------------------|-----------|
| Domain 1     | Kebijakan Internal SPBE | 13,00     |
| Domain 2     | Tata Kelola SPBE        | 25,00     |
| Domain 3     | Manajemen SPBE          | 16,50     |
| Domain 4     | Layanan SPBE            | 45,50     |
|              | Total Bobot             | 100,00    |



# Bobot Aspek

| Nomor Aspek | Nama Aspek  | Bobot (%) |
|-------------|---|-----------|
| Aspek 1     | Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE                   | 13,00     |
| Aspek 2     | Perencanaan Strategis SPBE                            | 10,00     |
| Aspek 3     | Teknologi Informasi dan Komunikasi                    | 10,00     |
| Aspek 4     | Penyelenggara SPBE                                    | 5,00      |
| Aspek 5     | Penerapan Manajemen SPBE                              | 12,00     |
| Aspek 6     | Pelaksanaan Audit TIK                                 | 4,50      |
| Aspek 7     | Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | 27,50     |
| Aspek 8     | Layanan Publik Berbasis Elektronik                    | 18,00     |
|             | Total Bobot   | 100,00    |



**TERIMA  
KASIH**



# **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**





## INSTRUKTUR DOMAIN TATA KELOLA SPBE

Ir. **KHAKIM GHOZALI, M.MT.**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**



### ✓ **Riwayat Pendidikan**

- S2, Manajemen Teknologi Informasi , Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- S1, Teknik Elektro – Komputer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.



### ✓ **Pengalaman Profesi**

Dosen / Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember



### ✓ **Pengalaman SPBE**

- 2020 : Evaluator Eksternal SPBE
- 1999 – 2018, Pengalaman Sebagai Evaluator TIK, antara lain: Review Implementasi Aplikasi Government Resources Management, Evaluasi Capaian Master Plan Smart City, Evaluasi Capaian Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan masih banyak lagi.
- 2001 – 2020, Pengalaman Penyusunan Rencana Induk SPBE/TIK di berbagai Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2012 – 2017, Pengalaman Sebagai Narasumber TIK di berbagai kesempatan
- 2000 – 2019, Pengalaman Dalam Pembuatan Aplikasi di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



# **MATERI INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**



## **DOMAIN 4 LAYANAN**

### **Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik**



## Domain 4: Layanan SPBE

| Indikator      | Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE                   |
|----------------|--|
| <b>Aspek 8</b> | <b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>              |
| <b>42</b>      | <b>Layanan Pengaduan Pelayanan Publik</b>              |
| <b>43</b>      | <b>Layanan Data Terbuka</b>                            |
| <b>44</b>      | <b>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)</b> |
| <b>45</b>      | <b>Layanan Publik Sektor 1</b>                         |
| <b>46</b>      | <b>Layanan Publik Sektor 2</b>                         |
| <b>47</b>      | <b>Layanan Publik Sektor 3</b>                         |

# Tingkat Kematangan Layanan Publik



1

Memberikan **informasi 1 arah**

Layanan

1 - Informasi

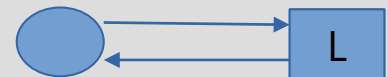
L



2

**pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen**

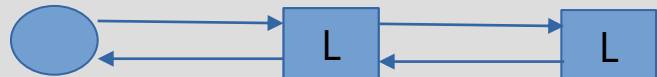
2 - Interaksi



3

layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti **transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data**

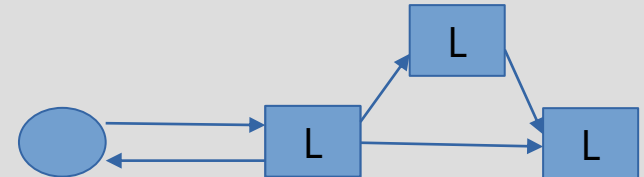
3 - Transaksi



4

Layanan **kolaborasi** dengan layanan elektronik lain

4 - Kolaborasi



5

**Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti**

5 - Optimum



## **INDIKATOR 42**

### **LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**



# LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- **Pengaduan Pelayanan Publik** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



# LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- **Data pendukung** berupa
  - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
  - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
  - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
  - video penggunaan aplikasi,
  - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
  - arsitektur aplikasi,
  - pengelolaan repositori API,
  - unit kerja yang menangani manajemen layanan,
  - dan bukti terkait lainnya.
- Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.



## INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 8 | Layanan Publik Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|------------------------------------|
| Indikator 42 | Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik   |         |                                    |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian                            |
| 1            | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan <b>layanan informasi</b> terkait pengaduan pelayanan publik.  |         |                                    |
| 2            | <b>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan interaksi</b> terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |                                    |
| 3            | <b>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan transaksi</b> kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |                                    |
| 4            | <b>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |                                    |
| 5            | <b>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan <b>perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  |         |                                    |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |                                    |
| Penjelasan : |   |         |                                    |
| Data dukung: |   |         |                                    |



## INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>  | <i>Data Dukung</i>  |
|----------------|--|---|
| 1              | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan <b>layanan informasi</b> terkait pengaduan pelayanan publik.   | Dokumentasi yang menggambarkan adanya <b>informasi pengaduan pelayanan publik</b> pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  |
| 2              | <b>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan interaksi</b> terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.                                     | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi <b>untuk berinteraksi dengan pengguna</b> , seperti adanya <b>fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan</b> pada layanan pengaduan publik.  |
| 3              | <b>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan transaksi</b> kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya <b>fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi</b> , maka sistem aplikasi memiliki <b>fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data</b> baik antar pengguna maupun automasi. |



## INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>   | <i>Data Dukung</i>  |
|----------------|---|---|
| 4              | <b>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi <b>dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya</b> , sebagai hasil integrasi layanan/ <i>middleware</i> /basis data seperti ditunjukkan pada <b>Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</b> .  |
| 5              | <b>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi</b> dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan <b>perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.  | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem <b>aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya</b> . Terdapat <b>notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</b> ; |



## Contoh Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

- SP4N Lapor - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
  - Dikembangkan bersama-sama oleh Ombudsman RI, KSP, Kementerian PANRB
- WiSE – Tempat pelaporan terintegrasi oleh Kemenkeu
- E Wadul
  - Aplikasi pelaporan online oleh Surabaya
- Pengaduan Publik Lainnya – dikembangkan oleh unit kerja/perangkat daerah



# LAPOR – Layanan Pengaduan Publik KemenpanRB

## PermenPAN RB 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional



lapor.go.id

**LAPOR!** TENTANG LAPOR! MASUK

### Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

Untuk laporan terkait COVID-19, gunakan hashtag #CORONA dan pilih kategori CORONA

**PENGADUAN** ASPIRASI PERMINTAAN INFORMASI

Ketik Judul Laporan Anda \*

Ketik Isi Laporan Anda \*





# Studi Kasus : Integrasi berbagai media pengaduan dan SP4N LAPOR di Pemkot Surabaya



## INFORMASI

Cari



### MEDIA CENTER PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PELAYANAN INFORMASI (PPID KOTA SURABAYA)

INFORMASI PERDAGANGAN

INFORMASI HARGA POKOK

WISATA KULINER SURABAYA

NAMA DAN STATUS JALAN

TRANSPORTASI

STATISTIK SURABAYA

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN

DAFTAR INOVASI

TAMAN-TAMAN DI KOTA SURABAYA

TEMPAT PERIBADATAN

TWITTER : @SAPAWARGASBY

INSTAGRAM : @SAPAWARGASBY

FACEBOOK FAN PAGE : SAPAWARGA KOTA SURABAYA

WEBSITE : MEDIA CENTER SURABAYA

EMAIL : MEDIACENTER@SURABAYA.GO.ID

PPID KOTA SURABAYA

REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI / KELUHAN MASYARAKAT

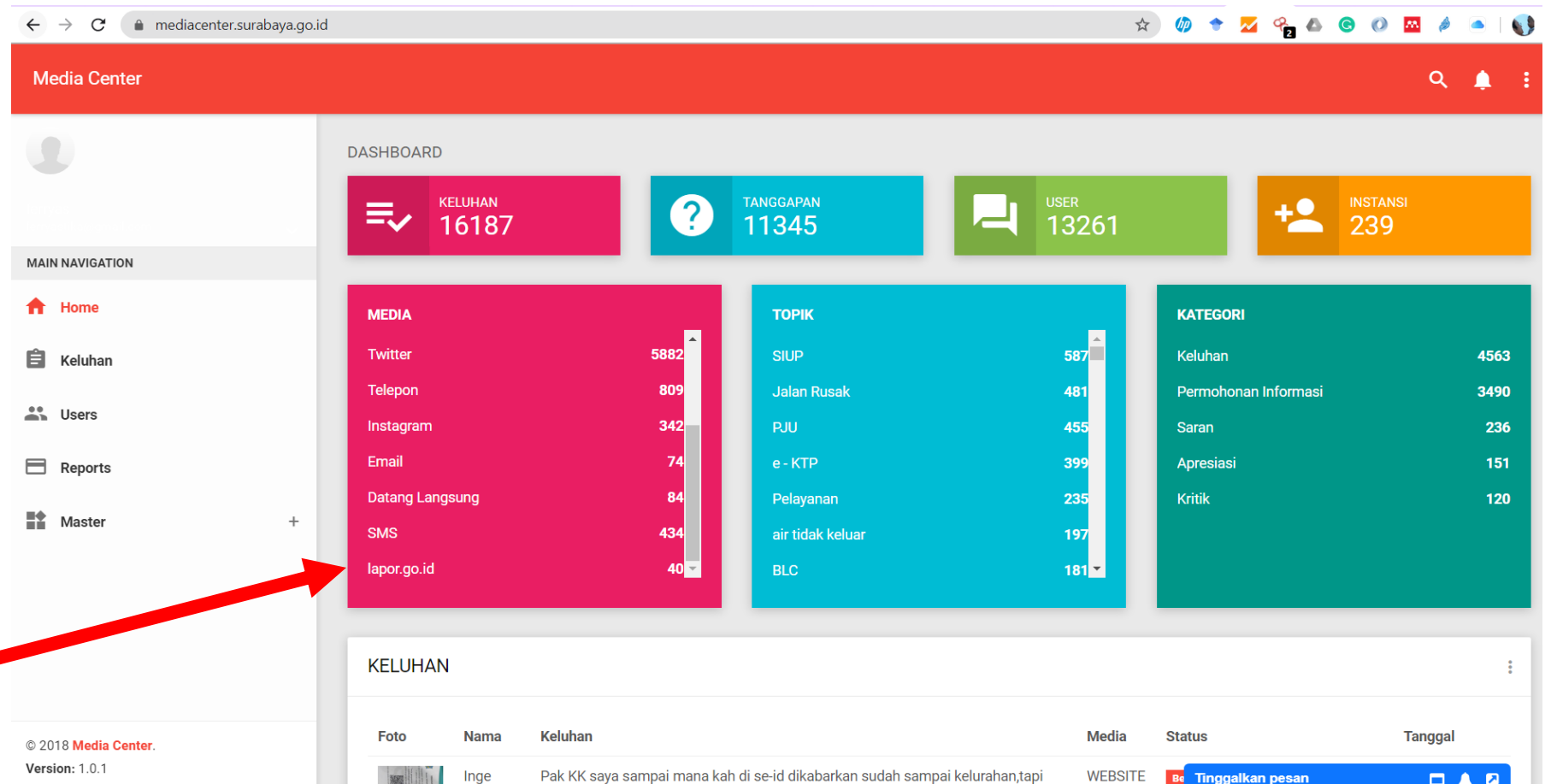
MOBILE APP E-WADUL

TELEPON : HOTLINE +6231 545-6290 | TOLL FREE +62-800-1404122

# SURABAYA



Contoh kasus – Level kematangan teknis layanan pengaduan publik TINGKAT 5  
Sistem pengaduan publik **dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.**



Memenuhi tingkat 4,  
adanya kolaborasi sistem



# Data Dukung lainnya – berupa rekapan dan evaluasi tindak lanjut layanan pengaduan publik berbasis elektronik



|   |                 |
|---|-----------------|
| Indikator 14_c Keluhan Keseluruhan Januari 2017   | 13/12/2018 2:45 |
| Indikator 14_d Keluhan Keseluruhan Februari 2017  | 13/12/2018 2:45 |
| Indikator 14_e Keluhan Keseluruhan maret 2017     | 13/12/2018 2:45 |
| Indikator 14_f Keluhan Keseluruhan April 2017     | 13/12/2018 2:09 |
| Indikator 14_g Keluhan Keseluruhan Mei 2017       | 13/12/2018 2:09 |
| Indikator 14_h Keluhan Keseluruhan Juni 2017      | 13/12/2018 2:09 |
| Indikator 14_i Keluhan Keseluruhan Juli 2017      | 13/12/2018 2:10 |
| Indikator 14_j Keluhan Keseluruhan Agustus 2017   | 13/12/2018 2:09 |
| Indikator 14_k Keluhan Keseluruhan September 2017 | 13/12/2018 2:10 |
| Indikator 14_l Keluhan Keseluruhan Oktober 2017   | 13/12/2018 2:09 |
| Indikator 14_m Keluhan Keseluruhan November 2017  | 13/12/2018 2:09 |
| Indikator 14_n Keluhan Keseluruhan Desember 2017  | 13/12/2018 2:09 |

Rekapitulasi Keluhan Masyarakat  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya  
Bulan Mei 2017

| No | Tanggal    | Identitas Pelapor   | Keluhan   | Jam Terima | Jam Integrasi | Jawaban  | Keterangan                                    |
|----|------------|---|---|------------|---------------|--|---|
| 1  | 02-05-2017 | Nama : -<br>Alamat : -<br>Telepon : 085708525274<br>Disampaikan melalui sms   | Assalamu'alaikum wr.wb... Bu risma saya ini warga surabaya... Nama saya khoir... Saya 3 tahun yang lalu pernah mengurus surat pindah sudah sampai kecamatan tapi belum selesai trus sekarang saya mengurus kembali tapi lewat online tapi No NIK saya sudah tidak terdaftar.. Terus itu bagaimana bu tolong di jawab?? Nik 3578274302800004   | 08.56 WIB  | 09.03 WIB     | Hasil koordinasi dg Dispendukcapil Sby dpt kami sampaikan bhw untuk pengurusan pindah yg sudah sampai di kecamatan dan tetunda 3 tahun dpt mengurus kembali ke Dispendukcapil Sby di Gedung Siola, Jl Tunjungan menuju ke loket pindah dg membawa fotocopy da asli surat pindah tersebut. Trm ksh.   | Disampaikan ke warga 2 Mei 2017 pkl.09.21 WIB |
| 2  | 02-05-2017 | Nama : Pipit Setiowati<br>Alamat : Sukolilo,<br>Telepon : 085707899xxx<br>Disampaikan melalui Media Harian Jawa Pos | Pada 18 April saya ke Dispendukcapil Surabaya untuk mengubah data saya dan suami dalam Kartu Keluarga (KK). Kami membutuhkan data yang benar untuk mengurus tabungan haji. Semua kelengkapan berkas kami bawa. Salah satunya akta kelahiran yang sudah dilegalisasi dinas terkait. Namun, petugas Dispendukcapil tidak bersedia untuk mengubah nama suami yang kurang satu huruf di KK. Soalnya, nama yang tercantum di akta kelahiran berupa singkatan "Muh". Petugas itu menyarankan kami untuk mengurus revisi akta kelahiran. Padahal, di semua berkas yang dimiliki suami, baik ijazah, akta nikah, maupun surat | 08.11 WIB  | 08.19 WIB     | Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2017, dapat kami sampaikan bahwa mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang Saudara alami. Jika diurutkan awal yang pertama kali dimiliki adalah Akta Kelahiran, apabila kemudian ada perbedaan data baik nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dengan dokumen lainnya seperti ijazah / buku nikah / KTP / KK, maka yang menjadi dasar penulisan data adalah data pada dokumen pertama kami yang dimiliki warga negara yakni Akta Kelahiran. Untuk pengajuan perubahan nama di KK dan KTP dapat dilakukan dengan dasar Akta Kelahiran dan Surat Kawin (untuk yang sudah kawin) dengan mengisi form perubahan data di Dispendukcapil Kota Surabaya, Gedung Siola, Jl Tunjungan no 1 | Disampaikan ke warga 4 Mei 2017 pkl.09.54 WIB |



# Data Analisis Pengaduan dan Solusinya



mediacenter.surabaya.go.id/reports?utf8=✓&instansi\_id=&date\_start=&date\_end=&status\_id=3&type=per\_skpd

Media Center



## MAIN NAVIGATION

- Home
- Keluhan
- Users
- Reports
- Master

## Report

Keluhan per Media Keluhan per SKPD Keluhan Per Topik Keluhan Per Bulan Keluhan top 10 SKPD Cetak

SKPD

None

Date start

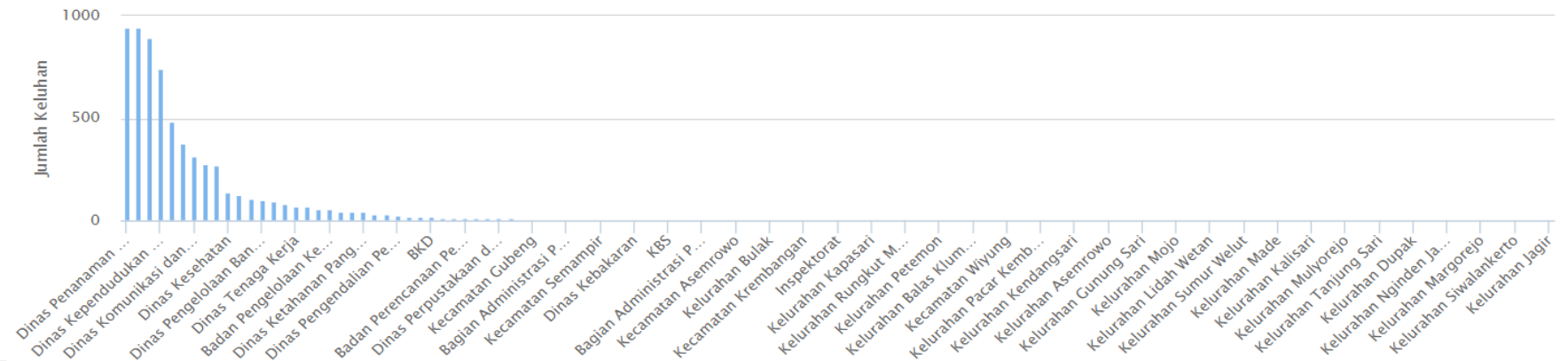
Date end

Status

OPD

## Status Keluhan

Source: keluhan





# Data Analisis Pengaduan dan Solusinya



Media Center



## MAIN NAVIGATION

Home

Keluhan

Users

Reports

Master

## Report

Keluhan per Media

Keluhan per SKPD

Keluhan Per Topik

Keluhan Per Bulan

Keluhan top 10 SKPD

Cetak

SKPD

None

Date start

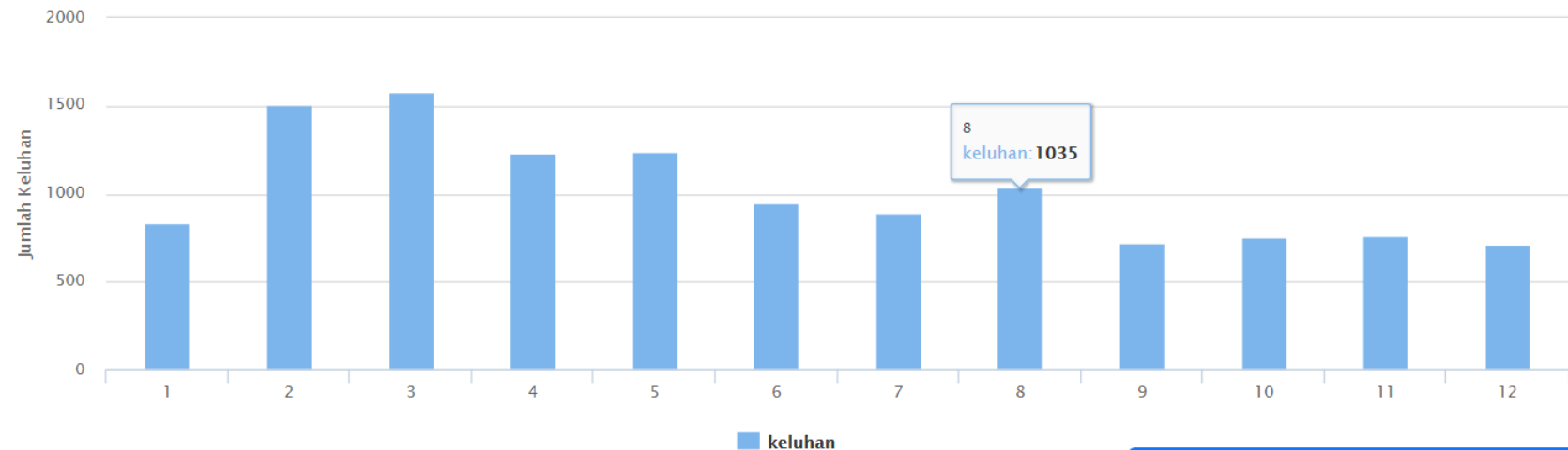
Date end

Status

Sudah terjawab dan sudah ditindak

## Status Keluhan

Source: keluhan





## **INDIKATOR 43 LAYANAN DATA TERBUKA**



# LAYANAN DATA TERBUKA

---

- **Data Terbuka**(*Open Data*) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Data Terbuka merupakan **sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.**
- Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



# LAYANAN DATA TERBUKA

---

- **Data pendukung** berupa :
  - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
  - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
  - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
  - video penggunaan aplikasi,
  - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
  - arsitektur aplikasi,
  - pengelolaan repositori API,
  - unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
  - bukti terkait lainnya.
- Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.



## INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 8 | Layanan Publik Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|------------------------------------|
| Indikator 43 | Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik   |         |                                    |
| Tingkat      | Kriteria  | Capaian |                                    |
| 1            | Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.   |         |                                    |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |                                    |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |                                    |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |                                    |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.                              |         |                                    |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |                                    |
| Penjelasan : |   |         |                                    |
| Data dukung: |   |         |                                    |



## INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



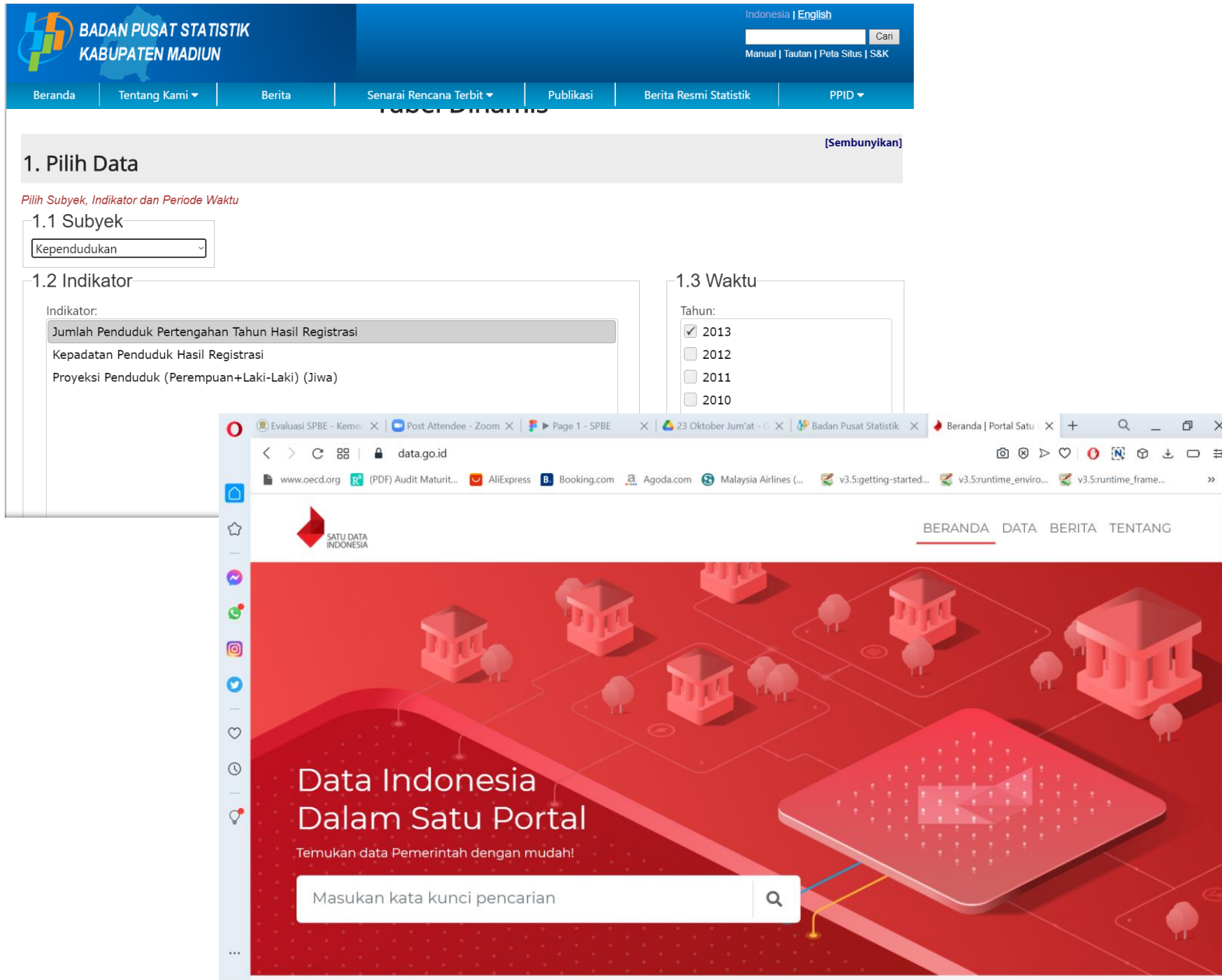
| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>   | <i>Bukti Dukung</i>  |
|----------------|---|--|
| 1              | Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan <b>layanan informasi</b> terkait data terbuka.  | Dokumentasi yang menggambarkan adanya <b>informasi data terbuka</b> pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.   |
| 2              | <b>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi</b> dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan interaksi</b> terkait data terbuka seperti <b>pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.</b>                                     | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk <b>berinteraksi dengan pengguna</b> , seperti adanya <b>fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh)</b> data terbuka.  |
| 3              | <b>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi</b> dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan transaksi</b> kepada pengguna terkait data terbuka seperti <b>transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.</b> | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk <b>transaksi</b> , dimana selain adanya <b>fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</b> untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi <b>mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data</b> baik antar pengguna maupun automasi. |



## INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>  | <i>Bukti Dukung</i>  |
|----------------|--|--|
| 4              | <b>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi</b> dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan <b>kolaborasi dengan layanan elektronik lain</b> , misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem <b>aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya</b> , sebagai hasil <b>integrasi layanan/middleware/basis data</b> seperti ditunjukkan pada <b>Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</b> .   |
| 5              | <b>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi</b> dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik <b>telah dilakukan perbaikan</b> berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.                               | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi <b>telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya</b> . Terdapat <b>notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut</b> pengembangan layanan SPBE, <b>bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE</b> , dan/atau <b>dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</b> ; |



Indonesia | English

Manual | Tautan | Peta Situs | S&K

Beranda | Tentang Kami | Berita | Senarai Rencana Terbit | Publikasi | Berita Resmi Statistik | PPID

## 1. Pilih Data

[Sembunyikan]

Pilih Subyek, Indikator dan Periode Waktu

1.1 Subyek

Kependudukan

1.2 Indikator

Indikator:

- Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Hasil Registrasi
- Kepadatan Penduduk Hasil Registrasi
- Proyeksi Penduduk (Perempuan+Laki-Laki) (Jiwa)

1.3 Waktu

Tahun:

- ☒ 2013
- ☐ 2012
- ☐ 2011
- ☐ 2010

data.go.id

BERANDA DATA BERITA TENTANG

### Data Indonesia Dalam Satu Portal

Temukan data Pemerintah dengan mudah!

Masukan kata kunci pencarian

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



# Open Data Pemprov Jawa Barat



← → ↺ 🏠 🔒 opendata.jabarprov.go.id/id ☆  
Apl Facebook Bookmarks FTP Directory: ftp://... Simitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Загрузка статьи Sci-Hub: removing... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfig... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Back... IC3iN



Topik ↑ Dataset Visualisasi Infografik Organisasi Bantuan ?



Ekonomi



Infrastruktur



Kemiskinan



Kependudukan



Kesehatan



Lingkungan Hidup



Pariwisata & Kebudayaan



Pemerintah & Desa

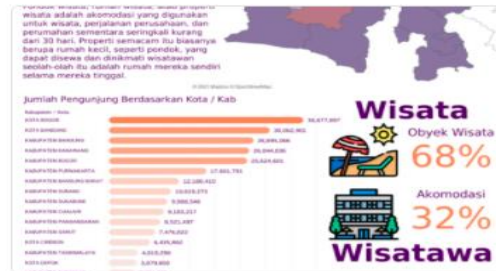


Pendidikan



Sosial

## Highlight Data



Pondok Wisata Berdasarkan Jumlah Pengunjung

Visualisasi • 16 Maret 2021



Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Berdasarkan Jenis Kelamin Di Jawa Barat

Dataset • 03 Maret 2021



Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Di Jawa Barat

Dataset • 14 Maret 2021



# Jakarta Open Data



datajakarta.go.id

Apl Bookmarks FTP Directory: ftp://... Simlitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Загрузка статьи Sci-Hub: removing... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfig... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Ba

**JAKARTA open data** Data Organisasi Topik Visualisasi Infografis Tentang

Selamat Datang di Portal  
Data Terbuka Pemerintah  
Provinsi DKI Jakarta

Cari Data, Tema, Instansi  Cari Data

Telusuri Berdasarkan Grup / Topik

< COVID-19 Kependudukan Kesehatan Keuangan Lingkungan Hidup >

**Statistik Portal Data Terbuka Jakarta**

|                        |                          |                         |                    |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>1839</b><br>Dataset | <b>6118</b><br>File Data | <b>53</b><br>Organisasi | <b>27</b><br>Topik |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|


  Ragu dengan berita **HOAKS** atau **FAKTA** ?  
Laporkan melalui **JALA HOAKS**  
**0813-5000-5331**

    
datajakarta.go.id/jalahoaks 




# Open Data Kota Bandung



**OPENDATA**  
KOTA BANDUNG

[Dataset](#) [Organisasi](#) [Grup](#) [Tentang](#) [Bantuan](#) [Versi 2.0](#)

[Home](#) / [Users](#) / [Open Data Kota Bandung](#)

**Open Data Kota Bandung**  
Inisiatif dan komitmen Kota Bandung dalam semangat keterbukaan data untuk mewujudkan Bandung Juara dan Bandung Smart City.

Followers  
**0**

Datasets  
**537**

Edits  
**3.3k**

**Username**  
administrator

**Member Since**  
July 23, 2017

**State**  
active

[Datasets](#) [Activity Stream](#)

**Posyandu di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung**  
Dataset ini berisi mengenai data posyandu yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung  
[CSV](#)

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung**  
Dataset ini berisi data PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bandung  
[CSV](#)

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung**  
Dataset ini berisi data PDRB atas dasar harga konstan Kota Bandung  
[CSV](#)

**Jumlah Linmas di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung**  
Dataset ini berisi data jumlah linmas di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.  
[CSV](#)

**Jumlah Penduduk Tidak Tetap Kecamatan Buahbatu Kota Bandung**  
Dataset ini berisi mengenai data jumlah penduduk tidak tetap di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung  
[CSV](#)

**APBD Kecamatan Buahbatu Kota Bandung**  
Dataset ini berisi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Buahbatu menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan...  
[CSV](#)



## **INDIKATOR 44 LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**



# LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

---

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



# LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

---

- **Data pendukung** berupa :
  - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
  - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
  - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
  - video penggunaan aplikasi,
  - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
  - arsitektur aplikasi,
  - pengelolaan repositori API,
  - unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
  - bukti terkait lainnya.
- Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.



## INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 8 | Layanan Publik Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|------------------------------------|
| Indikator 44 | Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik   |         |                                    |
| Tingkat      | Kriteria  | Capaian |                                    |
| 1            | Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.   |         |                                    |
| 2            | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.  |         |                                    |
| 3            | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |                                    |
| 4            | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |                                    |
| 5            | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidasi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   |         |                                    |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |                                    |
| Penjelasan : |   |         |                                    |
| Data dukung: |   |         |                                    |



## INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>   | <i>Data Dukung</i>   |
|----------------|---|--|
| 1              | Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan <b>layanan informasi</b> terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.  | Dokumentasi yang menggambarkan adanya <b>informasi produk hukum</b> pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.   |
| 2              | Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan interaksi</b> terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti <b>pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen</b> .                                     | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk <b>berinteraksi dengan pengguna</b> , seperti adanya <b>fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh)</b> produk hukum.  |
| 3              | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan transaksi</b> kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti <b>transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data</b> . | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk <b>transaksi</b> , dimana selain adanya fitur <b>upload (unggah) dan/atau download (unduh)</b> untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme <b>transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data</b> baik antar pengguna maupun automasi. |



## INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>   | <i>Data Dukung</i>  |
|----------------|---|---|
| 4              | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain</b> , misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem <b>aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya</b> , sebagai hasil <b>integrasi layanan/middleware/basis data</b> seperti ditunjukkan pada <b>Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</b> .  |
| 5              | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik <b>telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi</b> terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.   | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi <b>telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya</b> . Terdapat <b>notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</b> ; |



# INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Browser tabs: Evaluasi SPBE - Kemer, Post Attendee - Zoom, Page 1 - SPBE, 23 Oktober Jum'at - C, Badan Pusat Statistik, JDIHN

Address bar: jdihn.go.id

Navigation bar: Tentang JDIHN, Anggota JDIHN, Agenda, Berita, Galeri Foto / Video, Ruang Unduh, FAQ, Login, Registrasi Integrasi

## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

### Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan dokumen hukum yang Anda cari disini.

Categories: PENELITIAN HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, YURISPRUDENSI, PUTUSAN PENGADILAN, ARTIKEL HUKUM, NASKAH AKADEMIK

Search bar: Pencarian Kata Kunci Pencarian

Filters: Tipe Dokumen, Jenis Dokumen, Berdasarkan No Dokumen, Masukkan Tahun, Instansi, Status

| Tipe Dokumen | Jenis Dokumen | Berdasarkan No Dokumen | Masukkan Tahun | Instansi | Status |
|--------------|---------------|------------------------|----------------|----------|--------|
| 57.533       | 190.630       | 24.064                 | 15.874         | 22.862   | 3.448  |

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



# Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

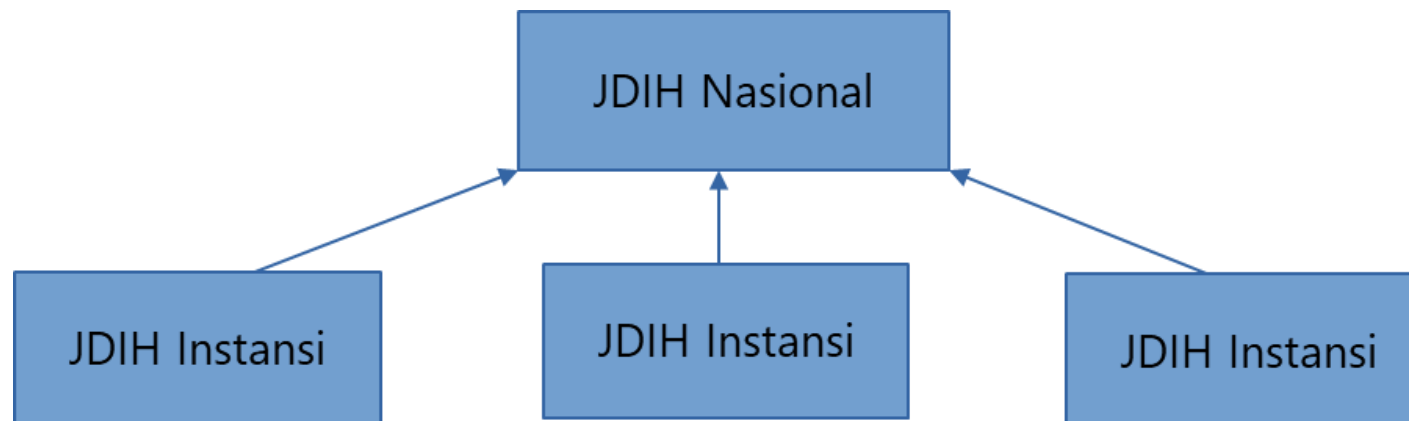
Tentang JDIHN ▾ Anggota JDIHN Agenda Berita Galeri Foto / Video Ruang Unduh FAQ Login Registrasi Integrasi

**Daftar Anggota JDIHN**  
Beranda → Daftar Anggota JDIHN

Informasi lebih lanjut, kunjungi media sosial kami

- Jdih nasional
- jdihnindonesia
- jdihnindonesia
- jdihn Indonesia

|                                 |                                 |   |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| JDIH Kementerian                | JDIH Sekretariat Lembaga Negara | JDIH Lembaga Pemerintah Non Kementerian |
| JDIH Pemerintah Provinsi        | JDIH Pemerintah Kabupaten       | JDIH Pemerintah Kota                    |
| JDIH DPRD Provinsi              | JDIH DPRD Kabupaten             | JDIH DPRD Kota                          |
| JDIH Perpustakaan Hukum         | JDIH Lembaga Lain               | JDIH Unit Eselon 1 Kemenkumham          |
| JDIH Kantor Wilayah Kemenkumham | JDIH Lembaga Non Struktural     |   |





# Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional

Show 10 entries Search:

| Anggota   | Website JDIHN   | Status Integrasi |
|---|---|------------------|
| Kementerian Agama RI  | <a href="https://jdih.kemenag.go.id/">https://jdih.kemenag.go.id/</a>                                 | Sudah            |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)         | <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/">https://jdih.atrbpn.go.id/</a>                                   | Sudah            |
| Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN)                                  | <a href="https://jdih.bumn.go.id/">https://jdih.bumn.go.id/</a>                                       | Sudah            |
| Kementerian Dalam Negeri RI   | <a href="http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/index.php">http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/index.php</a> | Sudah            |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KEMENDES) | <a href="http://jdih.kemendes.go.id/">http://jdih.kemendes.go.id/</a>                                 | Sudah            |
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM)                            | <a href="https://webjdih.esdm.go.id/">https://webjdih.esdm.go.id/</a>                                 | Sudah            |
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia                               | <a href="http://jdih.kemhuk.go.id/">jdih.kemhuk.go.id</a>   | Pusat JDIHN      |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP)                                     | <a href="http://jdih.kkp.go.id/">http://jdih.kkp.go.id/</a>   | Sudah            |
| Kementerian Kesehatan RI  | <a href="https://jdih.kemkes.go.id/">https://jdih.kemkes.go.id/</a>                                   | Sudah            |
| Kementerian Ketenagakerjaan RI  | <a href="https://jdih.kemnaker.go.id/">https://jdih.kemnaker.go.id/</a>                               | Sudah            |

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous 1 2 3 4 Next





PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
BAGIAN HUKUM

|               |   |
|---------------|---|
| NOMOR SOP     |   |
| TGL PEMBUATAN |   |
| TGL REVISI    |   |
| TGL EFEKTIF   |   |
| DISAHKAN OLEH | Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum,<br><br><br><b>Masnur, SH.</b><br>Penata<br>NIP. 19700701 199403 1 009 |
| NAMA SOP      | PENGLOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH  |

#### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
9. Keputusan Walikota Nomor 188.45/327/436.1.2/2013 tentang Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.

#### KETERKAITAN :

- SOP Penomoran, Autentikasi, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
- SOP Penomoran, Autentikasi, dan Pengundangan Peraturan Walikota Surabaya
- SOP Penomoran dan Autentikasi Keputusan Walikota Surabaya

#### PERINGATAN :

#### KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sesuai
2. Memiliki Pengetahuan tentang Pengelolaan website jdih.surabaya.co.id
3. Memahami mekanisme pengelolaan dan admin website

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Telepon
3. Instrumen
4. Data base pelayanan SKPD/Unit pelayanan terkait Pemerintah Kota
5. Ruang Kerja
6. Kendaraan Operasional

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan sebagai data manual / arsip dan data elektronik

| No. | Kegiatan   | Pelaksana              |                     | Mutu Baku                    |          |                               | Keterangan |
|-----|--|------------------------|---------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|------------|
|     |  | Staf Administrasi JDIH | Kasubag Dokumentasi | Kelengkapan                  | Waktu    | Output                        |            |
| 1.  | Mengumpulkan dan indentifikasi Produk Hukum  |                        |                     | Himpunan Produk Hukum Daerah | 5 Menit  | Himpunan Produk Hukum Daerah  |            |
| 2.  | Melakukan scan untuk produk hukum berupa hardcopy kemudian mengolah data hasil scan dan diubah ke format PDF. Untuk softcopy langsung diubah ke format PDF |                        |                     | Himpunan Produk Hukum Daerah | 40 Menit | File PDF                      |            |
| 3.  | Mengecek file PDF, sebelum diupload ke server JDIH   |                        |                     | File PDF                     | 10 Menit | File PDF                      |            |
| 4.  | Mengunggah softcopy produk hukum daerah ke website JDIH (jdih.surabaya.co.id)  |                        |                     | File PDF                     | 10 Menit | File PDF masuk ke server JDIH |            |

Contoh Tingkat 3 - Sistem JDIH menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.

The screenshot shows the JDIH Kota Surabaya website interface. At the top, there's a navigation bar with links: HOME, PERATURAN, PROFIL, BERITA, PPID, PORTAL, KONTAK. Below this is a section titled "DAFTAR PERATURAN" (List of Regulations). On the right side, there's a search bar labeled "CARI PERATURAN" (Search Regulations) with a dropdown menu showing "Peraturan Walikota" and input fields for "NOMOR" (Number), "TAHUN" (Year), and "JUDUL" (Title). Below the search bar, there's a table of regulations with columns: TYPE, NO, TAHUN, JUDUL, and STATUS. The table lists several regulations, including changes to the 73rd Mayor's Regulation of 2016 regarding the organization, tasks, and functions of the city government offices.



## **INDIKATOR 45-47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3**



# LAYANAN PUBLIK

## SEKTOR 1 - 3

---

- **Layanan Publik Sektor** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44.**



## INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



| Domain 4     | Layanan SPBE  | Aspek 8 | Layanan Publik Berbasis Elektronik |
|--------------|---|---------|------------------------------------|
| Indikator 45 | Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1-3 (.....)  |         |                                    |
| Tingkat      | Kriteria  |         | Capaian                            |
| 1            | Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan <b>layanan informasi</b> terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.  |         |                                    |
| 2            | <b>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan interaksi</b> terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.                                   |         |                                    |
| 3            | <b>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan transaksi</b> kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.  |         |                                    |
| 4            | <b>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. |         |                                    |
| 5            | <b>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik <b>telah dilakukan perbaikan</b> berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.                                  |         |                                    |
| Jawaban:     | Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5  |         |                                    |
| Penjelasan : |   |         |                                    |
| Data dukung: |   |         |                                    |



## INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>   | <i>Data Dukung</i>  |
|----------------|---|---|
| 1              | Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan <b>layanan informasi</b> terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.  | Dokumentasi yang menggambarkan adanya <b>informasi layanan sektoral</b> pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.  |
| 2              | <b>Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan interaksi</b> terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral. | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk <b>berinteraksi dengan pengguna</b> , seperti adanya fitur <b>pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh)</b> .   |
| 3              | <b>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan transaksi</b> kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.      | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk <b>transaksi</b> , dimana selain adanya <b>fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh)</b> untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme <b>transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi</b> . |



## INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



| <i>Tingkat</i> | <i>Kriteria</i>   | <i>Data Dukung</i>   |
|----------------|---|--|
| 4              | <b>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan <b>layanan kolaborasi</b> dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi <b>dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya</b> , sebagai hasil <b>integrasi layanan/middleware/basis data</b> seperti ditunjukkan pada <b>Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya</b> .   |
| 5              | <b>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi</b> dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik <b>telah dilakukan perbaikan</b> berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.                                 | Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi <b>telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya</b> . Terdapat <b>notulensi/catatan/telaah/laporan hasil revidi/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE</b> ; |



# Contoh Layanan Publik selain layanan pada indikator 32 – 44



## 1. Administrasi

- Kemenkeu (DJP Online)
- Kota Banjarmasin (Palui- Administrasi Kependudukan Terpadu)
- Kota Surabaya (SSW - Surabaya Single Window)

## 2. Jasa

- Kab Tangerang (Tax Shopping, Perpajakan terintegrasi dengan sektor swasta)
- Kota Balikpapan (SIMRS - Sistem Rumah sakit terpadu)

## 3. Barang

- KemenKominfo (Sistem Informasi Manajemen Spectrum)
- LAPAN (Pelayanan Data Penginderaan Jarak Jauh)




# Layanan Perijinan Satu Pintu

ssw.surabaya.go.id


lookmarks FTP Directory: ftp://... Simlitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfig... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Back... IC3INA 2019 Exploit Database -... CND | C

Home Masuk Registrasi Dashboard Panduan Monitoring Panduan Cetak SK


## Surabaya Single Window



**Perizinan Paket Investasi**  
Pengajuan paket investasi dilengkapi fitur peta




**Pendaftaran Izin Parsial Mandiri**  
Permohonan perizinan reguler secara online




**Monitoring Berkas SSW**  
Melihat progres / status berkas yang berjalan



**Verifikasi Berkas SSW**  
Pemeriksaan kelayakan administrasi berkas SSW



**Simulasi Penapisan**  
Rekomendasi Penentuan Paket SSW



**Contoh Penyusunan Dokumen**  
Unduh dan ketahui cara penyusunan dokumen SSW



# Layanan Pembayaran Pajak BPHTB

## (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

[Utama](#)[Tentang BPHTB](#)[Alur Sistem](#)[Peraturan](#)[Kanal Pembayaran](#)[Masuk](#)

### Alur e-BPHTB

01



Wajib Pajak/PPAT melakukan login ke [pajakonline.jakarta.go.id](http://pajakonline.jakarta.go.id) dan pilih menu BPHTB

02



Wajib Pajak/PPAT masukkan NOP PBB yang akan ditransaksikan BPHTB-nya

03



Sistem melakukan pengecekan tunggakan PBB

04



Jika tidak terdapat Tunggakan maka Wajib pajak mengisi SSPD BPHTB beserta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan

05



Petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah beserta data SSPD BPHTB yang diisi oleh Wajib Pajak/PPAT

06



Jika Ditolak WP melakukan perbaikan data dan dokumen, Jika diterima maka wajib pajak membuat Kode Bayar

07



Wajib Pajak/PPAT **MEMBAYAR Kode bayar melalui Kanal Pembayaran** yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI

08



Wajib Pajak/PPAT mengunggah Dokumen AJB yang sudah ditandatangani dan memberikan tanggal ajb



# TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA